



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
  - b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun, 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

32. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 50).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD selanjutnya disingkat RKAP-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

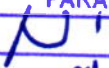





31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, dan Organisasi Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah;
34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
38. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
39. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
40. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
41. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
42. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

43. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  44. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
  45. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
  46. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  47. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
  48. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
  49. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayan kesehatan lainnya.
2. Mengubah Lampiran I, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 1), sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| INSTANSI         | PARAF   |
| 1. SEKDA         |  |
| 2. ASISTEN III   |  |
| 3. KEPALA BKAD   |  |
| 4. KABAG HUKUM   |  |
| 5.               |   |
| 6.               |   |

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 25 November 2020

**Plt. BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. ARSALIM ARIFIN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 25 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ..56

# **LAMPIRAN I**

**PELAKSANAAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD-P)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 56 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 25 November 2020**

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KONAWE  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD-P) KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut :

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan *proporsional*.

## B. PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

Pelaksanaan Perubahan APBD merupakan kumpulan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dari semua OPD yang telah menjadi ukuran capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam melakukan Pelaksanaan Perubahan APBD harus dilandasi dengan Kebijakan Umum APBD-P dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang APBD-P hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

### 1. Kriteria Pelaksanaan Perubahan APBD

Pelaksanaan Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup :
  - 1) Asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
  - 2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
  - 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
  - 4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain untuk :
  - 1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Pelaksanaan Perubahan APBD;
  - 2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - 3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya Kebijakan Pemerintah;
  - 4) Mendanai kegiatan lanjutan;
  - 5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;

- 6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
2. Cakupan Rancangan Pelaksanaan Perubahan APBD
    - a. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam RPJM.
    - b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
    - c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
    - d. Memuat hal-hal baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya maupun yang usulan kegiatan baru.
  3. Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Perubahan APBD
    - a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam Pelaksanaan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-OPD atau tidak perlu dengan menyusun RKAP-OPD baru.
    - b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam Pelaksanaan Perubahan APBD, harus diawali dengan Pelaksanaan dokumen RKAP-OPD.
    - c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD yang disebabkan karena *forcemajeur* atau diluar kemampuan maka tidak perlu diawali dengan menyusun RKAP-OPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.
  4. Hal-hal Lain Dalam Pelaksanaan Perubahan APBD
    - a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan PERDA tentang APBD, Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
    - b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

- c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa.
- d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga.
- e. Daftar kode rekening merupakan acuan baku dalam Pelaksanaan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara objektif, nyata dan harus di koordinasikan dengan PPKD.

### C. KEADAAN DARURAT

1. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :
  - 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD.
- 3.a. Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
  - b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
  - c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung serta tempat hunian sementara.
  - d. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :



- 1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - 2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - 3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - 4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - 5) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - 6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.
- e. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Pelaksanaan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- f. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- g. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- h. Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi setelah ditetapkannya Pelaksanaan Perubahan APBD tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-OPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan sumber dananya.

#### D. KEGIATAN TAHUN JAMAK

1. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
  - a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
3. Nota kesepakatan bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama kegiatan;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  - c. Jumlah anggaran; dan
  - d. Alokasi anggaran per tahun.
5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

#### E. PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

1. Terhadap pekerjaan dari kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berkenaan, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Untuk pekerjaan yang telah selesai pelaksanaannya, diberikan batas waktu sampai dengan 30 (*Tiga Puluh*) hari dari tanggal berakhir masa kontrak untuk memproses pencairan dana.
3. Untuk Kontrak yang berakhir di Bulan November – Desember agar memproses pencairan dana sebelum tanggal tutup register pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Cq. Bidang Perbendaharaan.
4. Kontrak yang masa berakhirnya di atas tanggal 20 (*Dua Puluh*) Desember tahun berkenaan, proses pencairan dana dilaksanakan pada tahun berikutnya.

5. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan *Desain dan Pengawasan*, pengajuan permintaan pembayaran paling lambat 2 (*dua*) bulan setelah tanggal kontrak berakhir, untuk segera mengajukan permintaan pembayaran, dan apabila melebihi dari batas waktu yang ditentukan maka akan menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan.
6. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan *Pengadaan Barang & Jasa*, pengajuan permintaan pembayaran paling lambat 2 (*dua*) bulan setelah tanggal kontrak berakhir.
7. Pengajuan permintaan pembayaran untuk Kekurangan, Gaji Berkala, paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan, dan untuk segala permintaan pembayaran yang melewati batas yang telah ditentukan, maka akan diproses pada tahun anggaran berikutnya.
8. Khusus untuk belanja *honorarium pegawai tidak tetap (PHTT), honorarium pengelola keuangan, tenaga Outsourcing, dan honorarium insentif/lainnya* yang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini, permintaan pembayaran untuk belanja tersebut dilakukan dengan mekanisme LS dan dibayarkan *perbulan*, terkecuali bagi OPD yang perhitungan *honorariumnya* masuk dalam perhitungan pagu UP maka, proses pembayarannya dilakukan melalui mekanisme GU.
9. Untuk belanja perjalanan dinas, permintaan pembayaran dilakukan melalui mekanisme GU, dan tidak diperkenankan melakukan permintaan pembayaran melalui mekanisme TU, di kecualikan untuk perjalanan dinas yang tidak termasuk dalam perhitungan pagu UP, maka diperkenankan untuk melakukan permintaan pembayaran melalui mekanisme TU.
10. Untuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) *honorarium pegawai tidak tetap (PHTT), honorarium pengelola keuangan, tenaga Outsourcing, dan honorarium insentif/lainnya* dapat dibayarkan dengan menggunakan dana UP/GU, teruntuk bagi OPD yang mempunyai kelebihan dana UP/GU.
11. Terhadap kesempatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan harus mempedomani ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

F. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

G. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

- H. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
- I. TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
- J. TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
- K. TATA CARA REVISI ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L) DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
- L. TATA CARA DAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
- M. TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

| PARAF KOORDINASI |                    |
|------------------|--------------------|
| INSTANSI         | PARAF              |
| 1. SEKDA         | <i>[Signature]</i> |
| 2. ASISTEN III   | <i>[Signature]</i> |
| 3. KEPALA BKAD   | <i>[Signature]</i> |
| 4. KABAG HUKUM   | <i>[Signature]</i> |
| 5.               |                    |
| 6.               |                    |

**Plt. BUPATI KONAWE SELATAN,**

*[Signature]*  
  
**H. ARSALIM ARIFIN**

# **LAMPIRAN V**

**BIAYA PERJALANAN DINAS,  
BIAYA PEMELIHARAAN/SEWA  
KENDARAAN DINAS,  
PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN  
BIAYA MASUKAN LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

**NOMOR : 56 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 25 November 2020**  
**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMELIHARAAN/SEWA KENDARAAN DINAS, PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN BIAYA MASUKAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020**

#### A. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon II b dibatasi sebanyak 7 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR dan Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah, Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf :

|              |          |
|--------------|----------|
| Eselon III a | : 5 Kali |
| Eselon III b | : 4 Kali |
| Eselon IV    | : 2 Kali |
| Staf         | : 1 Kali |

Sedangkan Pejabat/Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan dengan permintaan *undangan/surat/telegram* dari Kementerian.
4. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf ASN/Non ASN, pada OPD Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibatasi sebanyak 3 kali/tahun.
5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
  - a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
  - b. Eselon IV sebanyak 3 kali/tahun
  - c. Staf ASN & Non ASN sebanyak 4 kali/tahunKecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 6 Kali/tahun.
6. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas maksimal 4 (*empat*) hari;

- b. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan luar daerah hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*;
- d. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kwitansi hotel. Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (4 hari), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal riil yang tertera di tiket penerbangan dan *boarding pass*;
- g. Biaya Perjalanan Dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (*Dua*) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (*Enam*) hari;
- h. Perjalanan Dinas untuk komponen Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) lama waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari;
- i. Ketentuan yang dimaksud pada poin (g) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah.
- j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan Non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas dengan tingkatan yang disetarakan dengan ASN Golongan II.
- k. Terkait tarif tiket penerbangan yang mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan, untuk itu Perencana OPD agar menyesuaikan kenaikan harga tiket penerbangan terkini secara *proporsional*.
- l. Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada tahun berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan Khusus Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah Dalam Negeri:

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 dan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum :

| No. | Yang Melakukan Perjalanan Dinas                                   | Satuan | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp.) | Diklat/ Bimtek (Rp.) |
|-----|---|--------|--|----------------------|
| 1   | Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD                                    | OH     | 3.000.000,-                                    | 3.000.000,-          |
| 2   | Wakil Ketua DPRD  | OH     | 2.500.000,-                                    | 2.500.000,-          |
| 3   | Eselon II A/Anggota DPRD<br>Ketua TP PKK                          | OH     | 2.000.000,-                                    | 2.000.000,-          |
| 4   | Wakil Ketua TP PKK  | OH     | 1.500.000,-                                    | 1.200.000,-          |
| 5   | Eselon II B   | OH     | 1.700.000,-                                    | 1.200.000,-          |
| 6   | Eselon III A  | OH     | 1.500.000,-                                    | 1.100.000,-          |
| 7   | Eselon III B  | OH     | 1.400.000,-                                    | 1.000.000,-          |
| 8   | Eselon IV A   | OH     | 1.300.000,-                                    | 900.000,-            |
| 9   | Eselon IV B /Golongan IV  | OH     | 1.200.000,-                                    | 850.000,-            |
| 10  | Golongan III  | OH     | 1.100.000,-                                    | 800.000,-            |
| 11  | Golongan I, II dan non ASN  | OH     | 1.000.000,-                                    | 700.000,-            |
| 12  | Khusus Auditor dan P2UPD Selama Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek |        |  |                      |
|     | - Golongan IV   | OH     | -  | 600.000,-            |
|     | - Golongan III  | OH     | -  | 500.000,-            |

Catatan : Apabila Ketua/Wakil Ketua TP PKK berstatus sebagai ASN pada lingkup OPD Kabupaten Konawe Selatan Maka Standar Biaya Perjalanan Dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ASN sesuai dengan *Eselonisasi*.

1.2. Satuan Biaya Penginapan (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara) mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

| No. | Yang Melakukan Perjalanan Dinas                                   | Satuan | Besar Biaya Penginapan (Rp.) |
|-----|---|--------|------------------------------|
| 1   | Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD                                   | OH     | 8.000.000,-                  |
| 2   | Wakil Ketua DPRD  | OH     | 8.000.000,-                  |
| 3   | Eselon II/Anggota DPRD Ketua TP PKK                               | OH     | 1.500.000,-                  |
| 4   | Wakil Ketua TP PKK  | OH     | 1.300.000,-                  |
| 5   | Eselon III  | OH     | 1.000.000,-                  |
| 6   | Eselon IV/ Golongan IV  | OH     | 700.000,-                    |
| 7   | Golongan III  | OH     | 600.000,-                    |
| 8   | Golongan I, II dan non PNS  | OH     | 500.000,-                    |
| 9   | Khusus Auditor dan P2UPD Selama Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek | OH     | 500.000,-                    |



Catatan :

1. Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa *online* (traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).
  2. Biaya Penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari ketentuan tarif hotel dikota tempat tujuan.
- 1.3. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi) mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| No. | Yang Melakukan Perjalanan Dinas | Satuan | Uang Representasi Luar Daerah (Rp.) |
|-----|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1   | Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD | OH     | 250.000,00                          |
| 2   | Wakil Ketua DPRD                | OH     | 200.000,00                          |
| 3   | Eselon II/Anggota DPRD          | OH     | 150.000,00                          |

- 1.4. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*. Dengan Ketentuan lain sebagai berikut :
- a. Kelas penerbangan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan **Kelas Bisnis**, sedangkan untuk pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan **Kelas Ekonomi**;
  - b. Biaya *airport tax* serta biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat penginapan adalah sebesar Rp. 550.000,- untuk pergi dan sebaliknya dari tempat penginapan ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan adalah sebesar Rp. 550.000,- sehingga total biaya adalah sebesar **Rp. 1.100.000,-** dibayarkan secara *lumpsum*;
  - c. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*).

1.5. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yaitu sebesar **Rp. 350.000,-** yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

1.6. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| No. | Yang Melakukan Perjalanan Dinas | Satuan | Uang Representasi Luar Daerah (Rp.) |
|-----|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1.  | Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD  | OH     | 125.000                             |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD                | OH     | 100.000                             |
| 3.  | Eselon II/Anggota DPRD          | OH     | 75.000                              |

1.7. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kabupaten/Kota lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum* adalah sebagai berikut :

| NO. | KABUPATEN/KOTA             | SATUAN     | BIAYA TA. 2020 |
|-----|----------------------------|------------|----------------|
| 1   | Kota Kendari               | Orang/Kali | 100.000        |
| 2   | Kabupaten Konawe           | Orang/Kali | 150.000        |
| 3   | Kabupaten Konawe Utara     | Orang/Kali | 160.000        |
| 4   | Kabupaten Konawe Kepulauan | Orang/Kali | 250.000        |
| 5   | Kabupaten Kolaka           | Orang/Kali | 240.000        |
| 6   | Kabupaten Kolaka Utara     | Orang/Kali | 300.000        |
| 7   | Kabupaten Kolaka Timur     | Orang/Kali | 200.000        |
| 8   | Kabupaten Bombana          | Orang/Kali | 150.000        |
| 9   | Kota Bau-Bau               | Orang/Kali | 500.000        |
| 10  | Kabupaten Buton            | Orang/Kali | 600.000        |
| 11  | Kabupaten Buton Utara      | Orang/Kali | 450.000        |
| 12  | Kabupaten Buton Tengah     | Orang/Kali | 600.000        |
| 13  | Kabupaten Buton Selatan    | Orang/Kali | 600.000        |
| 14  | Kabupaten Muna             | Orang/Kali | 440.000        |
| 15  | Kabupaten Muna Barat       | Orang/Kali | 400.000        |
| 16  | Kabupaten Wakatobi         | Orang/Kali | 500.000        |

Catatan : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan transportasi udara maka dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tiket penerbangan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.

- 1.8. Satuan Biaya Penginapan lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

| No. | Yang Melakukan Perjalanan Dinas     | Satuan | Besar Biaya Penginapan (Rp.) |
|-----|-------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1   | Bupati/Ketua DPRD                   | OH     | 800.000,-                    |
| 2   | Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD       | OH     | 700.000,-                    |
| 3   | Eselon II/Anggota DPRD/Ketua TP PKK | OH     | 700.000,-                    |
| 4   | Wakil Ketua TP PKK                  | OH     | 600.000,-                    |
| 5   | Eselon III                          | OH     | 450.000,-                    |
| 6   | Eselon IV/Golongan IV               | OH     | 400.000,-                    |
| 7   | Golongan III                        | OH     | 350.000,-                    |
| 8   | Golongan I, II dan Non PNS          | OH     | 300.000,-                    |

Catatan : Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa *online* (traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).

## 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD | Rp. 260.000 |
| b. Wakil Ketua DPRD               | Rp. 240.000 |
| c. Eselon II/Anggota DPRD         | Rp. 220.000 |
| d. Eselon III                     | Rp. 200.000 |
| e. Eselon IV/Golongan IV          | Rp. 180.000 |
| f. Golongan III                   | Rp. 160.000 |
| g. Golongan I, II dan Non ASN     | Rp. 150.000 |

- 2.2. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara *lumpsum* terdiri :

| NO. | KECAMATAN | SATUAN     | BIAYA TA. 2020 |
|-----|-----------|------------|----------------|
| 1   | Landono   | Orang/Kali | 120.000        |
| 2   | Lainea    | Orang/Kali | 100.000        |
| 3   | Kolono    | Orang/Kali | 150.000        |
| 4   | Tinanggea | Orang/Kali | 100.000        |
| 5   | Moramo    | Orang/Kali | 130.000        |
| 6   | Angata    | Orang/Kali | 120.000        |
| 7   | Laonti    | Orang/Kali | 250.000        |
| 8   | Lalembuu  | Orang/Kali | 150.000        |

| NO.   | KECAMATAN        | SATUAN     | BIAYA TA. 2020     |
|---|------------------|------------|--------------------|
| 9   | Mowila           | Orang/Kali | 120.000            |
| 10  | Benua            | Orang/Kali | 120.000            |
| 11  | Moramo Utara     | Orang/Kali | 120.000            |
| 12  | Basala           | Orang/Kali | 150.000            |
| 13  | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 120.000            |
| 14  | Kolono Timur     | Orang/Kali | 150.000            |
| 15  | Sabulakoa        | Orang/Kali | 150.000            |
| 16  | Buke             | Orang/Kali | 95.000             |
| 17  | Palangga         | Orang/Kali | 85.000             |
| 18  | Palangga Selatan | Orang/Kali | 100.000            |
| 19  | Baito            | Orang/Kali | 95.000             |
| 20  | Laeya            | Orang/Kali | 85.000             |
| 21  | Konda            | Orang/Kali | 85.000             |
| 22  | Wolasi           | Orang/Kali | 85.000             |
| 23  | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000             |
| 24  | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 85.000             |
| 25  | Andoolo          | Orang/Kali | 75.000             |
| Kecuali Kel. Potoro, Alangga, Andoolo, Punggapu, Alengge Agung, dan Lalonggombu |                  |            | Tidak di Anggarkan |

2.3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup wilayah kecamatan berlaku sebagai berikut :

| NO. | URAIAN   | BIAYA TA. 2020   |
|-----|--|--|
| 1   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Lebih</i> dari >10 km dari tempat Kedudukan  | Tidak diberikan uang transport namun, diberikan uang harian sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum                 |
| 2   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Kurang</i> dari <10 km dari tempat Kedudukan | Diberikan uang transport sebesar Rp. 30.000.00,- dan uang makan ASN/Non ASN sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum |

2.4. Satuan Biaya Transport Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

| NO. | KECAMATAN | SATUAN     | BIAYA TA. 2020 |
|-----|-----------|------------|----------------|
| 1   | Landono   | Orang/Kali | 180.000        |
| 2   | Lainea    | Orang/Kali | 180.000        |
| 3   | Kolono    | Orang/Kali | 220.000        |
| 4   | Tinanggea | Orang/Kali | 150.000        |
| 5   | Moramo    | Orang/Kali | 200.000        |
| 6   | Angata    | Orang/Kali | 180.000        |
| 7   | Laonti    | Orang/Kali | 500.000        |

| NO. | KECAMATAN        | SATUAN     | BIAYA TA. 2020 |
|-----|------------------|------------|----------------|
| 8   | Lalembuu         | Orang/Kali | 220.000        |
| 9   | Mowila           | Orang/Kali | 180.000        |
| 10  | Benua            | Orang/Kali | 180.000        |
| 11  | Moramo Utara     | Orang/Kali | 180.000        |
| 12  | Basala           | Orang/Kali | 220.000        |
| 13  | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 180.000        |
| 14  | Kolono Timur     | Orang/Kali | 220.000        |
| 15  | Sabulakoa        | Orang/Kali | 200.000        |
| 16  | Buke             | Orang/Kali | 130.000        |
| 17  | Palangga         | Orang/Kali | 120.000        |
| 18  | Palangga Selatan | Orang/Kali | 150.000        |
| 19  | Baito            | Orang/Kali | 130.000        |
| 20  | Laeya            | Orang/Kali | 120.000        |
| 21  | Konda            | Orang/Kali | 150.000        |
| 22  | Wolasi           | Orang/Kali | 150.000        |
| 23  | Ranomeeto        | Orang/Kali | 180.000        |
| 24  | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 120.000        |
| 25  | Andoolo          | Orang/Kali | 110.000        |

2.5. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

| NO.            | ASAL    | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA TRANSPORT TA. 2020 |
|----------------|---------|------------------|------------|--------------------------|
| <b>ANDOOLO</b> |         |                  |            |                          |
| 1              | Andoolo | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 85.000                   |
| 2              | Andoolo | Buke             | Orang/Kali | 95.000                   |
| 3              | Andoolo | Palangga         | Orang/Kali | 85.000                   |
| 4              | Andoolo | Palangga Selatan | Orang/Kali | 100.000                  |
| 5              | Andoolo | Baito            | Orang/Kali | 95.000                   |
| 6              | Andoolo | Tinanggea        | Orang/Kali | 100.000                  |
| 7              | Andoolo | Lalembuu         | Orang/Kali | 150.000                  |
| 8              | Andoolo | Benua            | Orang/Kali | 120.000                  |
| 9              | Andoolo | Basala           | Orang/Kali | 150.000                  |
| 10             | Andoolo | Angata           | Orang/Kali | 120.000                  |
| 11             | Andoolo | Laeya            | Orang/Kali | 85.000                   |
| 12             | Andoolo | Lainea           | Orang/Kali | 100.000                  |
| 13             | Andoolo | Wolasi           | Orang/Kali | 85.000                   |
| 14             | Andoolo | Konda            | Orang/Kali | 85.000                   |
| 15             | Andoolo | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000                   |
| 16             | Andoolo | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 120.000                  |
| 17             | Andoolo | Landono          | Orang/Kali | 120.000                  |

| NO.                  | ASAL          | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|----------------------|---------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 18                   | Andoolo       | Mowila           | Orang/Kali | 120.000                        |
| 19                   | Andoolo       | Sabulakoa        | Orang/Kali | 150.000                        |
| 20                   | Andoolo       | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 21                   | Andoolo       | Moramo Utara     | Orang/Kali | 120.000                        |
| 22                   | Andoolo       | Kolono           | Orang/Kali | 150.000                        |
| 23                   | Andoolo       | Kolono Timur     | Orang/Kali | 150.000                        |
| 24                   | Andoolo       | Laonti           | Orang/Kali | 250.000                        |
| <b>ANDOOLO BARAT</b> |               |                  |            |                                |
| 25                   | Andoolo Barat | Andoolo          | Orang/Kali | 85.000                         |
| 26                   | Andoolo Barat | Buke             | Orang/Kali | 85.000                         |
| 27                   | Andoolo Barat | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 28                   | Andoolo Barat | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 29                   | Andoolo Barat | Baito            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 30                   | Andoolo Barat | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 31                   | Andoolo Barat | Lalembuu         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 32                   | Andoolo Barat | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 33                   | Andoolo Barat | Basala           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 34                   | Andoolo Barat | Angata           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 35                   | Andoolo Barat | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 36                   | Andoolo Barat | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 37                   | Andoolo Barat | Wolasi           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 38                   | Andoolo Barat | Konda            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 39                   | Andoolo Barat | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 40                   | Andoolo Barat | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 41                   | Andoolo Barat | Landono          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 42                   | Andoolo Barat | Mowila           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 43                   | Andoolo Barat | Sabulakoa        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 44                   | Andoolo Barat | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 45                   | Andoolo Barat | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 46                   | Andoolo Barat | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 47                   | Andoolo Barat | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 48                   | Andoolo Barat | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>BUKE</b>          |               |                  |            |                                |
| 49                   | Buke          | Andoolo          | Orang/Kali | 85.000                         |
| 50                   | Buke          | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 85.000                         |
| 51                   | Buke          | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 52                   | Buke          | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 53                   | Buke          | Baito            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 54                   | Buke          | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 55                   | Buke          | Lalembuu         | Orang/Kali | 105.000                        |

| NO.             | ASAL     | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|-----------------|----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 56              | Buke     | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 57              | Buke     | Basala           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 58              | Buke     | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 59              | Buke     | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 60              | Buke     | Lainea           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 61              | Buke     | Wolasi           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 62              | Buke     | Konda            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 63              | Buke     | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 64              | Buke     | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 65              | Buke     | Landono          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 66              | Buke     | Mowila           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 67              | Buke     | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 68              | Buke     | Moramo           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 69              | Buke     | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 70              | Buke     | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 71              | Buke     | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 72              | Buke     | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>PALANGGA</b> |          |                  |            |                                |
| 73              | Palangga | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 74              | Palangga | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 75              | Palangga | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 76              | Palangga | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 77              | Palangga | Baito            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 78              | Palangga | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 79              | Palangga | Lalembuu         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 80              | Palangga | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 81              | Palangga | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 82              | Palangga | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 83              | Palangga | Laeya            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 84              | Palangga | Lainea           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 85              | Palangga | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 86              | Palangga | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 87              | Palangga | Ranomeeto        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 88              | Palangga | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 105.000                        |
| 89              | Palangga | Landono          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 90              | Palangga | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 91              | Palangga | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 92              | Palangga | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 93              | Palangga | Moramo Utara     | Orang/Kali | 120.000                        |
| 94              | Palangga | Kolono           | Orang/Kali | 110.000                        |

| NO.                     | ASAL             | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 95                      | Palangga         | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 96                      | Palangga         | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>PALANGGA SELATAN</b> |                  |                  |            |                                |
| 97                      | Palangga Selatan | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 98                      | Palangga Selatan | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 99                      | Palangga Selatan | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 100                     | Palangga Selatan | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 101                     | Palangga Selatan | Baito            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 102                     | Palangga Selatan | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 103                     | Palangga Selatan | Lalembuu         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 104                     | Palangga Selatan | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 105                     | Palangga Selatan | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 106                     | Palangga Selatan | Angata           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 107                     | Palangga Selatan | Laeya            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 108                     | Palangga Selatan | Lainea           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 109                     | Palangga Selatan | Wolasi           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 110                     | Palangga Selatan | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 111                     | Palangga Selatan | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 112                     | Palangga Selatan | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 113                     | Palangga Selatan | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 114                     | Palangga Selatan | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 115                     | Palangga Selatan | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 116                     | Palangga Selatan | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 117                     | Palangga Selatan | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 118                     | Palangga Selatan | Kolono           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 119                     | Palangga Selatan | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 120                     | Palangga Selatan | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>BAITO</b>            |                  |                  |            |                                |
| 121                     | Baito            | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 122                     | Baito            | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 123                     | Baito            | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 124                     | Baito            | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 125                     | Baito            | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 126                     | Baito            | Tinanggea        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 127                     | Baito            | Lalembuu         | Orang/Kali | 110.000                        |
| 128                     | Baito            | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 129                     | Baito            | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 130                     | Baito            | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 131                     | Baito            | Laeya            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 132                     | Baito            | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |



| NO.              | ASAL      | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 133              | Baito     | Wolasi           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 134              | Baito     | Konda            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 135              | Baito     | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 136              | Baito     | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 137              | Baito     | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 138              | Baito     | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 139              | Baito     | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 140              | Baito     | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 141              | Baito     | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 142              | Baito     | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 143              | Baito     | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 144              | Baito     | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>TINANGGEA</b> |           |                  |            |                                |
| 145              | Tinanggea | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 146              | Tinanggea | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 147              | Tinanggea | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 148              | Tinanggea | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 149              | Tinanggea | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 150              | Tinanggea | Baito            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 151              | Tinanggea | Lalembuu         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 152              | Tinanggea | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 153              | Tinanggea | Basala           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 154              | Tinanggea | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 155              | Tinanggea | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 156              | Tinanggea | Lainea           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 157              | Tinanggea | Wolasi           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 158              | Tinanggea | Konda            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 159              | Tinanggea | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 160              | Tinanggea | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 161              | Tinanggea | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 162              | Tinanggea | Mowila           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 163              | Tinanggea | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 164              | Tinanggea | Moramo           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 165              | Tinanggea | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 166              | Tinanggea | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 167              | Tinanggea | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 168              | Tinanggea | Laonti           | Orang/Kali | 300.000                        |
| <b>LALEMBUU</b>  |           |                  |            |                                |
| 169              | Lalembuu  | Andoolo          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 170              | Lalembuu  | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |

| NO.          | ASAL     | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|--------------|----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 171          | Lalembuu | Buke             | Orang/Kali | 105.000                        |
| 172          | Lalembuu | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 173          | Lalembuu | Palangga Selatan | Orang/Kali | 105.000                        |
| 174          | Lalembuu | Baito            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 175          | Lalembuu | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 176          | Lalembuu | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 177          | Lalembuu | Basala           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 178          | Lalembuu | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 179          | Lalembuu | Laeya            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 180          | Lalembuu | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 181          | Lalembuu | Wolasi           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 182          | Lalembuu | Konda            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 183          | Lalembuu | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 184          | Lalembuu | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 140.000                        |
| 185          | Lalembuu | Landonu          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 186          | Lalembuu | Mowila           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 187          | Lalembuu | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 188          | Lalembuu | Moramo           | Orang/Kali | 160.000                        |
| 189          | Lalembuu | Moramo Utara     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 190          | Lalembuu | Kolono           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 191          | Lalembuu | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 192          | Lalembuu | Laonti           | Orang/Kali | 300.000                        |
| <b>BENUA</b> |          |                  |            |                                |
| 193          | Benua    | Andoolo          | Orang/Kali | 85.000                         |
| 194          | Benua    | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 195          | Benua    | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 196          | Benua    | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 197          | Benua    | Palangga Selatan | Orang/Kali | 105.000                        |
| 198          | Benua    | Baito            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 199          | Benua    | Tinanggea        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 200          | Benua    | Lalembuu         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 201          | Benua    | Basala           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 202          | Benua    | Angata           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 203          | Benua    | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 204          | Benua    | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 205          | Benua    | Wolasi           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 206          | Benua    | Konda            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 207          | Benua    | Ranomeeto        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 208          | Benua    | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 105.000                        |
| 209          | Benua    | Landonu          | Orang/Kali | 95.000                         |

| NO.           | ASAL   | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|
| 210           | Benua  | Mowila           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 211           | Benua  | Sabulakoa        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 212           | Benua  | Moramo           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 213           | Benua  | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 214           | Benua  | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 215           | Benua  | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 216           | Benua  | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>BASALA</b> |        |                  |            |                                |
| 217           | Basala | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 218           | Basala | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 219           | Basala | Buke             | Orang/Kali | 95.000                         |
| 220           | Basala | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 221           | Basala | Palangga Selatan | Orang/Kali | 105.000                        |
| 222           | Basala | Baito            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 223           | Basala | Tinanggea        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 224           | Basala | Lalembuu         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 225           | Basala | Benua            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 226           | Basala | Angata           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 227           | Basala | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 228           | Basala | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 229           | Basala | Wolasi           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 230           | Basala | Konda            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 231           | Basala | Ranomeeto        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 232           | Basala | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 233           | Basala | Landono          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 234           | Basala | Mowila           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 235           | Basala | Sabulakoa        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 236           | Basala | Moramo           | Orang/Kali | 160.000                        |
| 237           | Basala | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 238           | Basala | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 239           | Basala | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 240           | Basala | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>ANGATA</b> |        |                  |            |                                |
| 241           | Angata | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 242           | Angata | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 95.000                         |
| 243           | Angata | Buke             | Orang/Kali | 105.000                        |
| 244           | Angata | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 245           | Angata | Palangga Selatan | Orang/Kali | 110.000                        |
| 246           | Angata | Baito            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 247           | Angata | Tinanggea        | Orang/Kali | 105.000                        |

| NO.          | ASAL   | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|--------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|
| 248          | Angata | Lalembuu         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 249          | Angata | Benua            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 250          | Angata | Basala           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 251          | Angata | Laeya            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 252          | Angata | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 253          | Angata | Wolasi           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 254          | Angata | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 255          | Angata | Ranomeeto        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 256          | Angata | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 105.000                        |
| 257          | Angata | Landonno         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 258          | Angata | Mowila           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 259          | Angata | Sabulakoa        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 260          | Angata | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 261          | Angata | Moramo Utara     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 262          | Angata | Kolono           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 263          | Angata | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 264          | Angata | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>LAEYA</b> |        |                  |            |                                |
| 265          | Laeya  | Andoolo          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 266          | Laeya  | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 105.000                        |
| 267          | Laeya  | Buke             | Orang/Kali | 105.000                        |
| 268          | Laeya  | Palangga         | Orang/Kali | 85.000                         |
| 269          | Laeya  | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 270          | Laeya  | Baito            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 271          | Laeya  | Tinanggea        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 272          | Laeya  | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 273          | Laeya  | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 274          | Laeya  | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 275          | Laeya  | Angata           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 276          | Laeya  | Lainea           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 277          | Laeya  | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 278          | Laeya  | Konda            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 279          | Laeya  | Ranomeeto        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 280          | Laeya  | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 105.000                        |
| 281          | Laeya  | Landonno         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 282          | Laeya  | Mowila           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 283          | Laeya  | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 284          | Laeya  | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 285          | Laeya  | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 286          | Laeya  | Kolono           | Orang/Kali | 105.000                        |

| NO.           | ASAL   | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|
| 287           | Laeya  | Kolono Timur     | Orang/Kali | 110.000                        |
| 288           | Laeya  | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>LAINEA</b> |        |                  |            |                                |
| 289           | Lainea | Andoolo          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 290           | Lainea | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 105.000                        |
| 291           | Lainea | Buke             | Orang/Kali | 110.000                        |
| 292           | Lainea | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 293           | Lainea | Palangga Selatan | Orang/Kali | 95.000                         |
| 294           | Lainea | Baito            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 295           | Lainea | Tinanggea        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 296           | Lainea | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 297           | Lainea | Benua            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 298           | Lainea | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 299           | Lainea | Angata           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 300           | Lainea | Laeya            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 301           | Lainea | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 302           | Lainea | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 303           | Lainea | Ranomeeto        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 304           | Lainea | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 305           | Lainea | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 306           | Lainea | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 307           | Lainea | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 308           | Lainea | Moramo           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 309           | Lainea | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 310           | Lainea | Kolono           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 311           | Lainea | Kolono Timur     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 312           | Lainea | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>WOLASI</b> |        |                  |            |                                |
| 313           | Wolasi | Andoolo          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 314           | Wolasi | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 110.000                        |
| 315           | Wolasi | Buke             | Orang/Kali | 105.000                        |
| 316           | Wolasi | Palangga         | Orang/Kali | 95.000                         |
| 317           | Wolasi | Palangga Selatan | Orang/Kali | 105.000                        |
| 318           | Wolasi | Baito            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 319           | Wolasi | Tinanggea        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 320           | Wolasi | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 321           | Wolasi | Benua            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 322           | Wolasi | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 323           | Wolasi | Angata           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 324           | Wolasi | Laeya            | Orang/Kali | 95.000                         |

| NO.              | ASAL      | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 325              | Wolasi    | Lainea           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 326              | Wolasi    | Konda            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 327              | Wolasi    | Ranomeeto        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 328              | Wolasi    | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 95.000                         |
| 329              | Wolasi    | Landono          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 330              | Wolasi    | Mowila           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 331              | Wolasi    | Sabulakoa        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 332              | Wolasi    | Moramo           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 333              | Wolasi    | Moramo Utara     | Orang/Kali | 95.000                         |
| 334              | Wolasi    | Kolono           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 335              | Wolasi    | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 336              | Wolasi    | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>KONDA</b>     |           |                  |            |                                |
| 337              | Konda     | Andoolo          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 338              | Konda     | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |
| 339              | Konda     | Buke             | Orang/Kali | 110.000                        |
| 340              | Konda     | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 341              | Konda     | Palangga Selatan | Orang/Kali | 105.000                        |
| 342              | Konda     | Baito            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 343              | Konda     | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 344              | Konda     | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 345              | Konda     | Benua            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 346              | Konda     | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 347              | Konda     | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 348              | Konda     | Laeya            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 349              | Konda     | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 350              | Konda     | Wolasi           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 351              | Konda     | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 352              | Konda     | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 85.000                         |
| 353              | Konda     | Landono          | Orang/Kali | 95.000                         |
| 354              | Konda     | Mowila           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 355              | Konda     | Sabulakoa        | Orang/Kali | 105.000                        |
| 356              | Konda     | Moramo           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 357              | Konda     | Moramo Utara     | Orang/Kali | 85.000                         |
| 358              | Konda     | Kolono           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 359              | Konda     | Kolono Timur     | Orang/Kali | 110.000                        |
| 360              | Konda     | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>RANOMEETO</b> |           |                  |            |                                |
| 361              | Ranomeeto | Andoolo          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 362              | Ranomeeto | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |

| NO.                    | ASAL            | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 363                    | Ranomeeto       | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 364                    | Ranomeeto       | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 365                    | Ranomeeto       | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 366                    | Ranomeeto       | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 367                    | Ranomeeto       | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 368                    | Ranomeeto       | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 369                    | Ranomeeto       | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 370                    | Ranomeeto       | Basala           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 371                    | Ranomeeto       | Angata           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 372                    | Ranomeeto       | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 373                    | Ranomeeto       | Lainea           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 374                    | Ranomeeto       | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 375                    | Ranomeeto       | Konda            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 376                    | Ranomeeto       | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 85.000                         |
| 377                    | Ranomeeto       | Landonno         | Orang/Kali | 85.000                         |
| 378                    | Ranomeeto       | Mowila           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 379                    | Ranomeeto       | Sabulakoa        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 380                    | Ranomeeto       | Moramo           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 381                    | Ranomeeto       | Moramo Utara     | Orang/Kali | 95.000                         |
| 382                    | Ranomeeto       | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 383                    | Ranomeeto       | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 384                    | Ranomeeto       | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>RANOMEETO BARAT</b> |                 |                  |            |                                |
| 385                    | Ranomeeto Barat | Andoolo          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 386                    | Ranomeeto Barat | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |
| 387                    | Ranomeeto Barat | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 388                    | Ranomeeto Barat | Palangga         | Orang/Kali | 105.000                        |
| 389                    | Ranomeeto Barat | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 390                    | Ranomeeto Barat | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 391                    | Ranomeeto Barat | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 392                    | Ranomeeto Barat | Lalembuu         | Orang/Kali | 140.000                        |
| 393                    | Ranomeeto Barat | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 394                    | Ranomeeto Barat | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 395                    | Ranomeeto Barat | Angata           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 396                    | Ranomeeto Barat | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 397                    | Ranomeeto Barat | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 398                    | Ranomeeto Barat | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 399                    | Ranomeeto Barat | Konda            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 400                    | Ranomeeto Barat | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 401                    | Ranomeeto Barat | Landonno         | Orang/Kali | 95.000                         |

| NO.            | ASAL            | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|----------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 402            | Ranomeeto Barat | Mowila           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 403            | Ranomeeto Barat | Sabulakoa        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 404            | Ranomeeto Barat | Moramo           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 405            | Ranomeeto Barat | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 406            | Ranomeeto Barat | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 407            | Ranomeeto Barat | Kolono Timur     | Orang/Kali | 130.000                        |
| 408            | Ranomeeto Barat | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>LANDONO</b> |                 |                  |            |                                |
| 409            | Landono         | Andoolo          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 410            | Landono         | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 110.000                        |
| 411            | Landono         | Buke             | Orang/Kali | 110.000                        |
| 412            | Landono         | Palangga         | Orang/Kali | 110.000                        |
| 413            | Landono         | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 414            | Landono         | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 415            | Landono         | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 416            | Landono         | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 417            | Landono         | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 418            | Landono         | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 419            | Landono         | Angata           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 420            | Landono         | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 421            | Landono         | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 422            | Landono         | Wolasi           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 423            | Landono         | Konda            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 424            | Landono         | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 425            | Landono         | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 95.000                         |
| 426            | Landono         | Mowila           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 427            | Landono         | Sabulakoa        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 428            | Landono         | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 429            | Landono         | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 430            | Landono         | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 431            | Landono         | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 432            | Landono         | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>MOWILA</b>  |                 |                  |            |                                |
| 433            | Mowila          | Andoolo          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 434            | Mowila          | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 105.000                        |
| 435            | Mowila          | Buke             | Orang/Kali | 110.000                        |
| 436            | Mowila          | Palangga         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 437            | Mowila          | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 438            | Mowila          | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 439            | Mowila          | Tinanggea        | Orang/Kali | 110.000                        |



| NO.              | ASAL      | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 440              | Mowila    | Lalembuu         | Orang/Kali | 110.000                        |
| 441              | Mowila    | Benua            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 442              | Mowila    | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 443              | Mowila    | Angata           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 444              | Mowila    | Laeya            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 445              | Mowila    | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 446              | Mowila    | Wolasi           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 447              | Mowila    | Konda            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 448              | Mowila    | Ranomeeto        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 449              | Mowila    | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 95.000                         |
| 450              | Mowila    | Landonno         | Orang/Kali | 85.000                         |
| 451              | Mowila    | Sabulakoa        | Orang/Kali | 85.000                         |
| 452              | Mowila    | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 453              | Mowila    | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 454              | Mowila    | Kolono           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 455              | Mowila    | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 456              | Mowila    | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>SABULAKOA</b> |           |                  |            |                                |
| 457              | Sabulakoa | Andoolo          | Orang/Kali | 110.000                        |
| 458              | Sabulakoa | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 105.000                        |
| 459              | Sabulakoa | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 460              | Sabulakoa | Palangga         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 461              | Sabulakoa | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 462              | Sabulakoa | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 463              | Sabulakoa | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 464              | Sabulakoa | Lalembuu         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 465              | Sabulakoa | Benua            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 466              | Sabulakoa | Basala           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 467              | Sabulakoa | Angata           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 468              | Sabulakoa | Laeya            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 469              | Sabulakoa | Lainea           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 470              | Sabulakoa | Wolasi           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 471              | Sabulakoa | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 472              | Sabulakoa | Ranomeeto        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 473              | Sabulakoa | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 95.000                         |
| 474              | Sabulakoa | Landonno         | Orang/Kali | 85.000                         |
| 475              | Sabulakoa | Mowila           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 476              | Sabulakoa | Moramo           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 477              | Sabulakoa | Moramo Utara     | Orang/Kali | 110.000                        |
| 478              | Sabulakoa | Kolono           | Orang/Kali | 140.000                        |

| NO.                 | ASAL         | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|---------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 479                 | Sabulakoa    | Kolono Timur     | Orang/Kali | 140.000                        |
| 480                 | Sabulakoa    | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>MORAMO</b>       |              |                  |            |                                |
| 481                 | Moramo       | Andoolo          | Orang/Kali | 140.000                        |
| 482                 | Moramo       | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |
| 483                 | Moramo       | Buke             | Orang/Kali | 140.000                        |
| 484                 | Moramo       | Palangga         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 485                 | Moramo       | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 486                 | Moramo       | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 487                 | Moramo       | Tinanggea        | Orang/Kali | 140.000                        |
| 488                 | Moramo       | Lalembuu         | Orang/Kali | 160.000                        |
| 489                 | Moramo       | Benua            | Orang/Kali | 140.000                        |
| 490                 | Moramo       | Basala           | Orang/Kali | 160.000                        |
| 491                 | Moramo       | Angata           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 492                 | Moramo       | Laeya            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 493                 | Moramo       | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 494                 | Moramo       | Wolasi           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 495                 | Moramo       | Konda            | Orang/Kali | 95.000                         |
| 496                 | Moramo       | Ranomeeto        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 497                 | Moramo       | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 110.000                        |
| 498                 | Moramo       | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 499                 | Moramo       | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 500                 | Moramo       | Sabulakoa        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 501                 | Moramo       | Moramo Utara     | Orang/Kali | 85.000                         |
| 502                 | Moramo       | Kolono           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 503                 | Moramo       | Kolono Timur     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 504                 | Moramo       | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>MORAMO UTARA</b> |              |                  |            |                                |
| 505                 | Moramo Utara | Andoolo          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 506                 | Moramo Utara | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |
| 507                 | Moramo Utara | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 508                 | Moramo Utara | Palangga         | Orang/Kali | 120.000                        |
| 509                 | Moramo Utara | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 510                 | Moramo Utara | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 511                 | Moramo Utara | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 512                 | Moramo Utara | Lalembuu         | Orang/Kali | 140.000                        |
| 513                 | Moramo Utara | Benua            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 514                 | Moramo Utara | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 515                 | Moramo Utara | Angata           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 516                 | Moramo Utara | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |

| NO.                 | ASAL         | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|---------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 517                 | Moramo Utara | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 518                 | Moramo Utara | Wolasi           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 519                 | Moramo Utara | Konda            | Orang/Kali | 85.000                         |
| 520                 | Moramo Utara | Ranomeeto        | Orang/Kali | 95.000                         |
| 521                 | Moramo Utara | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 105.000                        |
| 522                 | Moramo Utara | Landono          | Orang/Kali | 105.000                        |
| 523                 | Moramo Utara | Mowila           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 524                 | Moramo Utara | Sabulakoa        | Orang/Kali | 110.000                        |
| 525                 | Moramo Utara | Moramo           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 526                 | Moramo Utara | Kolono           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 527                 | Moramo Utara | Kolono Timur     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 528                 | Moramo Utara | Laonti           | Orang/Kali | 270.000                        |
| <b>KOLONO</b>       |              |                  |            |                                |
| 529                 | Kolono       | Andoolo          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 530                 | Kolono       | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |
| 531                 | Kolono       | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 532                 | Kolono       | Palangga         | Orang/Kali | 110.000                        |
| 533                 | Kolono       | Palangga Selatan | Orang/Kali | 110.000                        |
| 534                 | Kolono       | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 535                 | Kolono       | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 536                 | Kolono       | Lalembuu         | Orang/Kali | 140.000                        |
| 537                 | Kolono       | Benua            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 538                 | Kolono       | Basala           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 539                 | Kolono       | Angata           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 540                 | Kolono       | Laeya            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 541                 | Kolono       | Lainea           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 542                 | Kolono       | Wolasi           | Orang/Kali | 110.000                        |
| 543                 | Kolono       | Konda            | Orang/Kali | 105.000                        |
| 544                 | Kolono       | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 545                 | Kolono       | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 546                 | Kolono       | Landono          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 547                 | Kolono       | Mowila           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 548                 | Kolono       | Sabulakoa        | Orang/Kali | 140.000                        |
| 549                 | Kolono       | Moramo           | Orang/Kali | 95.000                         |
| 550                 | Kolono       | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 551                 | Kolono       | Kolono Timur     | Orang/Kali | 85.000                         |
| 552                 | Kolono       | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>KOLONO TIMUR</b> |              |                  |            |                                |
| 553                 | Kolono Timur | Andoolo          | Orang/Kali | 130.000                        |
| 554                 | Kolono Timur | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 130.000                        |

| NO.           | ASAL         | TUJUAN           | SATUAN     | BIAYA<br>TRANSPORT<br>TA. 2020 |
|---------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 555           | Kolono Timur | Buke             | Orang/Kali | 130.000                        |
| 556           | Kolono Timur | Palangga         | Orang/Kali | 130.000                        |
| 557           | Kolono Timur | Palangga Selatan | Orang/Kali | 130.000                        |
| 558           | Kolono Timur | Baito            | Orang/Kali | 130.000                        |
| 559           | Kolono Timur | Tinanggea        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 560           | Kolono Timur | Lalembuu         | Orang/Kali | 140.000                        |
| 561           | Kolono Timur | Benua            | Orang/Kali | 140.000                        |
| 562           | Kolono Timur | Basala           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 563           | Kolono Timur | Angata           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 564           | Kolono Timur | Laeya            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 565           | Kolono Timur | Lainea           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 566           | Kolono Timur | Wolasi           | Orang/Kali | 130.000                        |
| 567           | Kolono Timur | Konda            | Orang/Kali | 110.000                        |
| 568           | Kolono Timur | Ranomeeto        | Orang/Kali | 130.000                        |
| 569           | Kolono Timur | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 130.000                        |
| 570           | Kolono Timur | Landono          | Orang/Kali | 140.000                        |
| 571           | Kolono Timur | Mowila           | Orang/Kali | 140.000                        |
| 572           | Kolono Timur | Sabulakoa        | Orang/Kali | 140.000                        |
| 573           | Kolono Timur | Moramo           | Orang/Kali | 105.000                        |
| 574           | Kolono Timur | Moramo Utara     | Orang/Kali | 105.000                        |
| 575           | Kolono Timur | Kolono           | Orang/Kali | 85.000                         |
| 576           | Kolono Timur | Laonti           | Orang/Kali | 280.000                        |
| <b>LAONTI</b> |              |                  |            |                                |
| 577           | Laonti       | Andoolo          | Orang/Kali | 280.000                        |
| 578           | Laonti       | Andoolo Barat    | Orang/Kali | 280.000                        |
| 579           | Laonti       | Buke             | Orang/Kali | 280.000                        |
| 580           | Laonti       | Palangga         | Orang/Kali | 270.000                        |
| 581           | Laonti       | Palangga Selatan | Orang/Kali | 280.000                        |
| 582           | Laonti       | Baito            | Orang/Kali | 280.000                        |
| 583           | Laonti       | Tinanggea        | Orang/Kali | 300.000                        |
| 584           | Laonti       | Lalembuu         | Orang/Kali | 300.000                        |
| 585           | Laonti       | Benua            | Orang/Kali | 270.000                        |
| 586           | Laonti       | Basala           | Orang/Kali | 280.000                        |
| 587           | Laonti       | Angata           | Orang/Kali | 270.000                        |
| 588           | Laonti       | Laeya            | Orang/Kali | 270.000                        |
| 589           | Laonti       | Lainea           | Orang/Kali | 270.000                        |
| 590           | Laonti       | Wolasi           | Orang/Kali | 270.000                        |
| 591           | Laonti       | Konda            | Orang/Kali | 270.000                        |
| 592           | Laonti       | Ranomeeto        | Orang/Kali | 270.000                        |
| 593           | Laonti       | Ranomeeto Barat  | Orang/Kali | 270.000                        |

| NO. | ASAL   | TUJUAN       | SATUAN     | BIAYA TRANSPORT TA. 2020 |
|-----|--------|--------------|------------|--------------------------|
| 594 | Laonti | Landono      | Orang/Kali | 270.000                  |
| 595 | Laonti | Mowila       | Orang/Kali | 270.000                  |
| 596 | Laonti | Sabulakoa    | Orang/Kali | 270.000                  |
| 597 | Laonti | Moramo       | Orang/Kali | 270.000                  |
| 598 | Laonti | Moramo Utara | Orang/Kali | 270.000                  |
| 599 | Laonti | Kolono       | Orang/Kali | 280.000                  |
| 600 | Laonti | Kolono Timur | Orang/Kali | 280.000                  |

2.6. Satuan Biaya Transport dalam daerah lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus yang bersumber dari dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dibayarkan secara lumpsum terdiri :

| NO. | URAIAN   | SATUAN     | BIAYA TA. 2020  |
|-----|--|------------|---|
| 1   | Perjalanan dinas dalam daerah petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak $\geq$ 10 km dari tempat Kedudukan | Orang/Kali | 125.000   |
| 2   | Perjalanan dinas dalam daerah petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak $<$ 10 km dari tempat kedudukan    | Orang/Kali | 75.000  |
| 3   | Perjalanan dinas ke desa pesisir/kepulauan petugas kesehatan puskesmas dalam lingkup kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat kedudukan puskesmas              | Orang/Kali | 200.000   |
| 4   | Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah pesisir/kepulauan dalam lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea  | Orang/Kali | 75.000  |
| 5   | Transport Kader Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dalam desa di lingkup kecamatan  | Orang/Kali | 50.000  |
| 6   | Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas  | Orang/Kali | Mengikuti poin 1 & 2 dalam aturan perjalanan dinas dalam daerah |

Catatan : Untuk Bidan Desa dan Petugas Kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam Nomor 2 dan 3 pada tabel diatas mengikuti aturan perjalanan dinas pada Tabel 2.3. Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kecamatan.

2.7. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Desa Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sebesar **Rp. 100.000,-** dengan satuan, Orang Perdesa (OD).

- 2.8. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka pemeriksaan *reguler*, pemeriksaan *tematik* dan *investigasi* dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan satuan, Orang Perhari (OH) yang terdiri :
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a. Auditor/P2UPD Pelaksana/Gol. II | Rp. 200.000,- |
| b. Auditor/P2UPD Pertama/Gol. III  | Rp. 250.000,- |
| c. Auditor/P2UPD Muda/Gol. III     | Rp. 275.000,- |
| d. Auditor/P2UPD Madya/Gol. IV     | Rp. 300.000,- |
| e. Eselon IV                       | Rp. 300.000,- |
| f. Eselon III                      | Rp. 350.000,- |
| g. Eselon II                       | Rp. 400.000,- |
- 2.9. Satuan Biaya Penginapan Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Tingkat Kecamatan/Desa dibayarkan sebesar **Rp. 300.000,-** dengan satuan, Per Hari (OH), dan dibayarkan secara *at cost* yang dibuktikan dengan *Print Out Invoice* dari tempat menginap di Hotel/Losmen. Dan apabila yang bersangkutan tidak menginap di Hotel/Losmen, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*Tiga Puluh Persen*) dari tarif yang ditentukan.
- 2.10. Penganggaran satuan biaya transport dalam daerah *bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD* mengikuti standar satuan biaya pada poin 2.5. diatas kecuali beberapa desa di Kecamatan Andoolo yang tidak termasuk didalamnya dan tidak dianggarkan.
- 2.11. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang berpedoman pada besaran biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

| NO. | NEGARA                 | SATUAN | GOLONGAN |     |     |     |
|-----|------------------------|--------|----------|-----|-----|-----|
|     |                        |        | A        | B   | C   | D   |
| (1) | (2)                    | (3)    | (4)      | (5) | (6) | (7) |
|     | <b>Amerika Utara</b>   |        |          |     |     |     |
| 1.  | Amerika Serikat        | OH     | 659      | 563 | 505 | 447 |
| 2.  | Kanada                 | OH     | 552      | 467 | 416 | 365 |
|     | <b>Amerika Selatan</b> |        |          |     |     |     |
| 3.  | Argentina              | OH     | 534      | 402 | 351 | 349 |
| 4.  | Venezuela              | OH     | 557      | 388 | 344 | 343 |

|                       |                      |    |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 5.                    | Brazil               | OH | 436 | 396 | 378 | 351 |
| 6.                    | Chile                | OH | 434 | 370 | 332 | 294 |
| 7.                    | Colombia             | OH | 466 | 413 | 405 | 365 |
| 8.                    | Peru                 | OH | 459 | 352 | 320 | 280 |
| 9.                    | Suriname             | OH | 398 | 364 | 268 | 268 |
| 10.                   | Ekuador              | OH | 416 | 355 | 319 | 283 |
| <b>Amerika Tengah</b> |                      |    |     |     |     |     |
| 11.                   | Meksiko              | OH | 553 | 468 | 417 | 366 |
| 12.                   | Kuba                 | OH | 453 | 385 | 345 | 305 |
| 13.                   | Panama               | OH | 418 | 357 | 320 | 283 |
| <b>Eropa Barat</b>    |                      |    |     |     |     |     |
| 14.                   | Austria              | OH | 504 | 453 | 347 | 317 |
| 15.                   | Belgia               | OH | 538 | 456 | 406 | 357 |
| 16.                   | Perancis             | OH | 548 | 464 | 413 | 381 |
| 17.                   | Rep. Federasi Jerman | OH | 485 | 415 | 368 | 324 |
| 18.                   | Belanda              | OH | 485 | 416 | 368 | 324 |
| 19.                   | Swiss                | OH | 636 | 570 | 444 | 401 |
| <b>Eropa Utara</b>    |                      |    |     |     |     |     |
| 20.                   | Denmark              | OH | 569 | 491 | 428 | 375 |
| 21.                   | Finlandia            | OH | 521 | 442 | 394 | 346 |
| 22.                   | Norwegia             | OH | 621 | 559 | 389 | 386 |
| 23.                   | Swedia               | OH | 615 | 519 | 461 | 403 |
| 24.                   | Kerajaan Inggris     | OH | 792 | 774 | 583 | 582 |
| <b>Eropa Selatan</b>  |                      |    |     |     |     |     |
| 25.                   | Bosnia Hersegovina   | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26.                   | Kroasia              | OH | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 27.                   | Spanyol              | OH | 457 | 413 | 335 | 296 |
| 28.                   | Yunani               | OH | 427 | 379 | 327 | 289 |
| 29.                   | Italia               | OH | 702 | 637 | 446 | 427 |
| 30.                   | Portugal             | OH | 425 | 382 | 308 | 273 |
| 31.                   | Serbia               | OH | 417 | 375 | 326 | 288 |
| <b>Eropa Timur</b>    |                      |    |     |     |     |     |
| 32.                   | Bulgaria             | OH | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33.                   | Ceko                 | OH | 618 | 526 | 447 | 367 |
| 34.                   | Hongaria             | OH | 485 | 438 | 390 | 345 |
| 35.                   | Polandia             | OH | 478 | 415 | 363 | 320 |
| 36.                   | Rumania              | OH | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37.                   | Rusia                | OH | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38.                   | Slovakia             | OH | 437 | 394 | 341 | 303 |
| 39.                   | Ukraina              | OH | 485 | 436 | 375 | 331 |
| <b>Afrika Barat</b>   |                      |    |     |     |     |     |
| 40.                   | Nigeria              | OH | 427 | 422 | 402 | 340 |
| 41.                   | Senegal              | OH | 420 | 359 | 322 | 285 |
| <b>Afrika Timur</b>   |                      |    |     |     |     |     |

|     |                       |    |     |     |     |     |
|-----|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 42. | Ethiopia              | OH | 373 | 320 | 288 | 256 |
| 43. | Kenya                 | OH | 408 | 358 | 293 | 274 |
| 44. | Madagaskar            | OH | 356 | 306 | 276 | 246 |
| 45. | Tanzania              | OH | 388 | 332 | 299 | 266 |
| 46. | Zimbabwe              | OH | 371 | 319 | 287 | 255 |
| 47. | Mozambik              | OH | 399 | 329 | 265 | 264 |
|     | <b>Afrika Selatan</b> |    |     |     |     |     |
| 48. | Namibia               | OH | 405 | 334 | 268 | 251 |
| 49. | Afrika Selatan        | OH | 427 | 374 | 317 | 294 |
|     | <b>Afrika Utara</b>   |    |     |     |     |     |
| 50. | Aljazair              | OH | 383 | 328 | 295 | 286 |
| 51. | Mesir                 | OH | 471 | 400 | 358 | 316 |
| 52. | Maroko                | OH | 377 | 323 | 291 | 259 |
| 53. | Tunisia               | OH | 293 | 247 | 225 | 203 |
| 54. | Sudan                 | OH | 383 | 328 | 295 | 262 |
| 55. | Libya                 | OH | 308 | 254 | 189 | 165 |
|     | <b>Asia Barat</b>     |    |     |     |     |     |
| 56. | Azerbaijan            | OH | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57. | Bahrain               | OH | 475 | 424 | 284 | 217 |
| 58. | Irak                  | OH | 461 | 392 | 351 | 310 |
| 59. | Yordania              | OH | 504 | 428 | 382 | 336 |
| 60. | Kuwait                | OH | 581 | 491 | 437 | 383 |
| 61. | Libanon               | OH | 457 | 389 | 348 | 307 |
| 62. | Qatar                 | OH | 506 | 448 | 349 | 290 |
| 63. | Arab Suriah           | OH | 358 | 301 | 272 | 243 |
| 64. | Turki                 | OH | 456 | 364 | 311 | 276 |
| 65. | Uni Emirat Arab       | OH | 594 | 502 | 446 | 391 |
| 66. | Yaman                 | OH | 353 | 249 | 226 | 204 |
| 67. | Saudi Arabia          | OH | 468 | 398 | 356 | 314 |
| 68. | Kesultanan Oman       | OH | 516 | 437 | 390 | 343 |
|     | <b>Asia Timur</b>     |    |     |     |     |     |
| 69. | Rep. Rakyat Tiongkok  | OH | 411 | 351 | 315 | 279 |
| 70. | Hongkong              | OH | 601 | 507 | 451 | 395 |
| 71. | Jepang                | OH | 519 | 428 | 382 | 336 |
| 72. | Korea Selatan         | OH | 515 | 467 | 425 | 421 |
| 73. | Korea Utara           | OH | 494 | 321 | 300 | 278 |
|     | <b>Asia Selatan</b>   |    |     |     |     |     |
| 74. | Afganistan            | OH | 385 | 262 | 238 | 214 |
| 75. | Bangladesh            | OH | 339 | 313 | 243 | 238 |
| 76. | India                 | OH | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77. | Pakistan              | OH | 343 | 277 | 251 | 225 |
| 78. | Srilanka              | OH | 388 | 332 | 299 | 266 |
| 79. | Iran                  | OH | 421 | 332 | 299 | 266 |
|     | <b>Asia Tengah</b>    |    |     |     |     |     |
| 80. | Uzbekistan            | OH | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81. | Kazakhstan            | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |



|     |                      |    |     |     |     |     |
|-----|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
|     | <b>Asia Tenggara</b> |    |     |     |     |     |
| 82. | Filipina             | OH | 412 | 367 | 266 | 226 |
| 83. | Singapura            | OH | 615 | 519 | 461 | 403 |
| 84. | Malaysia             | OH | 394 | 304 | 274 | 244 |
| 85. | Thailand             | OH | 392 | 330 | 297 | 264 |
| 86. | Myanmar              | OH | 368 | 250 | 210 | 196 |
| 87. | Laos                 | OH | 380 | 277 | 251 | 225 |
| 88. | Vietnam              | OH | 383 | 295 | 244 | 219 |
| 89. | Brunai Darussalam    | OH | 374 | 278 | 252 | 226 |
| 90. | Kamboja              | OH | 296 | 223 | 201 | 196 |
| 91. | Timor Leste          | OH | 392 | 354 | 236 | 212 |
|     | <b>Asia Pasifik</b>  |    |     |     |     |     |
| 92. | Australia            | OH | 636 | 585 | 424 | 393 |
| 93. | Selandia Baru        | OH | 545 | 461 | 411 | 361 |
| 94. | Kaledonia Baru       | OH | 425 | 387 | 299 | 266 |
| 95. | Papua Nugini         | OH | 520 | 476 | 429 | 376 |
| 96. | Fiji                 | OH | 427 | 365 | 327 | 289 |

Catatan : Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

**a. Golongan A**

menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

**b. Golongan B**

duta besar, ASN golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden dan pejabat lainnya yang setara.

**c. Golongan C**

ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.

**d. Golongan D**

ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan c.

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) :

a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*;

- b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*);
  - c. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan *Kelas Bisnis*;
  - d. Biaya perjalanan Luar Negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.
4. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan/Pelatihan/Bimtek Luar Kantor
1. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan Luar Kantor yang membutuhkan penyediaan anggaran bagi akomodasi dan penginapan berpedoman PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan dan sesuai kemampuan keuangan. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/Pelatihan/Bimtek di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :
- a. **Paket *Fullboard***, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap;
  - b. **Paket *Fullday***, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;
  - c. **Paket *Halfday***, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Beberapa catatan khusus terkait penganggaran kegiatan rapat/pertemuan adalah sebagai berikut :

- a. Akomodasi untuk paket *Fullboard* untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang, Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon III ke bawah dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Kegiatan yang diselenggarakan secara *Fullboard* dapat dilaksanakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan *fullboard* terdiri dari: biaya transportasi peserta, indeks paket pertemuan *fullboard* dan uang harian paket *Fullboard* luar kota.
- d. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan yang diselenggarakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari indeks paket pertemuan (*Fullboard/Fullday/HalfDay*).
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

2. Satuan Biaya Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah :

| No. | Paket Kegiatan                       | Satuan | Satuan Biaya (Rp.) |
|-----|--------------------------------------|--------|--------------------|
| 1.  | <i>FullBoard</i> di luar kota        | OH     | 130.000            |
| 2.  | <i>FullBoard</i> di dalam kota       | OH     | 110.000            |
| 3.  | <i>FullDay/HalfDay</i> di dalam kota | OH     | 95.000             |

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon II/Anggota DPRD :

| No. | Uraian                       | Satuan | <i>Fullboard</i> | <i>Fullday</i> | <i>Halfday</i> |
|-----|------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 1.  | Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD | OP     | 970.000          | 415.000        | 270.000        |
| 2.  | Eselon II/Anggota DPRD       | OP     | 800.000          | 350.000        | 237.000        |
| 3.  | Eselon III ke bawah          | OP     | 688.000          | 295.000        | 195.000        |

4. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek/Pelatihan/*Workshop* adalah maksimum **Rp. 5.000.000,-** sedangkan untuk kegiatan mengikuti TOT berkenaan dengan tupoksi adalah sebesar **Rp. 6.000.000,-**.

5. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk Pelatihan/Bimtek (Khusus Hanya Biaya Diklat) bagi *Auditor* dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) besarnya disesuaikan dengan permintaan dari Panitia Pelaksana Pelatihan/Diklat.

6. Biaya Kontribusi untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) :

- a. 1 Hari s/d 15 Hari = Rp. 200.000 Per Hari
- b. 1 Hari s/d 30 Hari = Rp. 150.000 Per Hari.

5. Penganggaran Biaya Sewa Kendaraan

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan *insidentil* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus menerus) berpedoman pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah bagi :

- (a) Pejabat Negara/Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan.

(b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

| No. | Provinsi Tujuan     | Satuan   | Roda 4    | Roda 6 / Bus Sedang | Roda 6 / Bus Besar |
|-----|---------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|
| 1.  | Aceh                | Per hari | 930.000   | 3.282.000           | 4.638.000          |
| 2.  | Sumatera Utara      | Per hari | 975.000   | 2.139.000           | 3.203.000          |
| 3.  | Riau                | Per hari | 978.000   | 2.606.000           | 3.908.000          |
| 4.  | Kepulauan Riau      | Per hari | 901.000   | 2.373.000           | 3.910.000          |
| 5.  | Jambi               | Per hari | 804.000   | 3.810.000           | 4.601.000          |
| 6.  | Sumatera Barat      | Per hari | 783.000   | 2.124.000           | 3.409.000          |
| 7.  | Sumatera Selatan    | Per hari | 1.212.000 | 2.200.000           | 4.097.000          |
| 8.  | Lampung             | Per hari | 846.000   | 3.594.000           | 5.052.000          |
| 9.  | Bengkulu            | Per hari | 777.000   | 3.810.000           | 5.159.000          |
| 10. | Bangka Belitung     | Per hari | 1.258.000 | 2.781.000           | 4.273.000          |
| 11. | Banten              | Per hari | 777.000   | 2.512.000           | 3.666.000          |
| 12. | Jawa Barat          | Per hari | 932.000   | 2.563.000           | 3.403.000          |
| 13. | DKI Jakarta         | Per hari | 911.000   | 2.221.000           | 3.439.000          |
| 14. | Jawa Tengah         | Per hari | 1.016.000 | 2.206.000           | 4.237.000          |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | Per hari | 905.000   | 2.207.000           | 3.565.000          |
| 16. | Jawa Timur          | Per hari | 966.000   | 2.446.000           | 3.222.000          |
| 17. | Bali                | Per hari | 925.000   | 2.658.000           | 3.536.000          |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per hari | 882.000   | 2.532.000           | 3.369.000          |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per hari | 857.000   | 2.548.000           | 3.468.000          |
| 20. | Kalimantan Barat    | Per hari | 868.000   | 2.611.000           | 3.644.000          |
| 21. | Kalimantan Tengah   | Per hari | 1.177.000 | 3.716.000           | 5.573.000          |
| 22. | Kalimantan Selatan  | Per hari | 778.000   | 2.630.000           | 3.452.000          |
| 23. | Kalimantan Timur    | Per hari | 1.100.000 | 2.750.000           | 3.863.000          |
| 24. | Kalimantan Utara    | Per hari | 1.100.000 | 2.713.000           | 3.863.000          |
| 25. | Sulawesi Utara      | Per hari | 956.000   | 2.205.000           | 3.722.000          |
| 26. | Gorontalo           | Per hari | 792.000   | 2.086.000           | 3.230.000          |
| 27. | Sulawesi Barat      | Per hari | 772.000   | 2.464.000           | 3.282.000          |
| 28. | Sulawesi Selatan    | Per hari | 796.000   | 2.708.000           | 3.434.000          |
| 29. | Sulawesi Tengah     | Per hari | 824.000   | 2.422.000           | 3.369.000          |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | Per hari | 839.000   | 2.609.000           | 3.433.000          |
| 31. | Maluku              | Per hari | 947.000   | 2.872.000           | 4.021.000          |
| 32. | Maluku Utara        | Per hari | 965.000   | 3.013.000           | 4.170.000          |
| 33. | Papua               | Per hari | 1.107.000 | 4.082.000           | 5.248.000          |
| 34. | Papua Barat         | Per hari | 1.059.000 | 3.499.000           | 4.547.000          |

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Negara/Daerah

Satuan biaya sewa kendaraan operasional Pejabat Negara/Daerah (Bupati/Ketua DPRD dan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dan untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus)

:

| No. | Provinsi Tujuan     | Satuan    | Biaya T.A. 2020 |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|
| 1.  | Aceh                | Per bulan | 14.180.000      |
| 2.  | Sumatera Utara      | Per bulan | 13.880.000      |
| 3.  | Riau                | Per bulan | 13.730.000      |
| 4.  | Kepulauan Riau      | Per bulan | 15.000.000      |
| 5.  | Jambi               | Per bulan | 13.500.000      |
| 6.  | Sumatera Barat      | Per bulan | 13.650.000      |
| 7.  | Sumatera Selatan    | Per bulan | 13.500.000      |
| 8.  | Lampung             | Per bulan | 13.430.000      |
| 9.  | Bengkulu            | Per bulan | 13.500.000      |
| 10. | Bangka Belitung     | Per bulan | 12.750.000      |
| 11. | Banten              | Per bulan | 13.950.000      |
| 12. | Jawa Barat          | Per bulan | 13.950.000      |
| 13. | DKI Jakarta         | Per bulan | 13.250.000      |
| 14. | Jawa Tengah         | Per bulan | 13.950.000      |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | Per bulan | 14.030.000      |
| 16. | Jawa Timur          | Per bulan | 13.430.000      |
| 17. | Bali                | Per bulan | 13.500.000      |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Per bulan | 13.650.000      |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Per bulan | 14.850.000      |
| 20. | Kalimantan Barat    | Per bulan | 14.030.000      |
| 21. | Kalimantan Tengah   | Per bulan | 14.140.000      |
| 22. | Kalimantan Selatan  | Per bulan | 14.030.000      |
| 23. | Kalimantan Timur    | Per bulan | 14.030.000      |
| 24. | Kalimantan Utara    | Per bulan | 14.030.000      |
| 25. | Sulawesi Utara      | Per bulan | 15.000.000      |
| 26. | Gorontalo           | Per bulan | 15.000.000      |
| 27. | Sulawesi Barat      | Per bulan | 13.580.000      |
| 28. | Sulawesi Selatan    | Per bulan | 13.580.000      |
| 29. | Sulawesi Tengah     | Per bulan | 14.400.000      |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | Per bulan | 14.030.000      |
| 31. | Maluku              | Per bulan | 14.480.000      |

| No. | Provinsi Tujuan | Satuan    | Biaya T.A. 2020 |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|
| 32. | Maluku Utara    | Per bulan | 14.400.000      |
| 33. | Papua           | Per bulan | 14.850.000      |
| 34. | Papua Barat     | Per bulan | 14.780.000      |

#### 6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

| No. | Uraian                       | Satuan | Biaya T.A. 2020 |
|-----|------------------------------|--------|-----------------|
| 1.  | Pakaian Dinas Upacara        | /Stel  | 15.000.000      |
| 2.  | Pakaian Sipil Harian (PSH)   |        |                 |
|     | - Bupati                     | /Stel  | 10.000.000      |
|     | - Wakil Bupati               | /Stel  | 8.000.000       |
|     | - Ketua DPRD                 | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Sekretaris Daerah          | /Stel  | 7.000.000       |
|     | - Wakil Ketua DPRD           | /Stel  | 6.000.000       |
|     | - Anggota DPRD               | /Stel  | 4.000.000       |
| 3.  | Pakaian Sipil Lengkap (PSL)  |        |                 |
|     | - Bupati                     | /Stel  | 15.000.000      |
|     | - Wakil Bupati               | /Stel  | 14.000.000      |
|     | - Ketua DPRD                 | /Stel  | 12.500.000      |
|     | - Sekretaris Daerah          | /Stel  | 12.500.000      |
|     | - Wakil Ketua DPRD           | /Stel  | 10.000.000      |
|     | - Anggota DPRD               | /Stel  | 7.500.000       |
| 4.  | Pakaian Sipil Resmi (PSR)    |        |                 |
|     | - Bupati                     | /Stel  | 15.000.000      |
|     | - Wakil Bupati               | /Stel  | 14.000.000      |
|     | - Ketua DPRD                 | /Stel  | 12.500.000      |
|     | - Sekretaris Daerah          | /Stel  | 10.000.000      |
|     | - Wakil Ketua DPRD           | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Anggota DPRD               | /Stel  | 5.000.000       |
| 5.  | Pakaian Dinas Harian (PDH)   |        |                 |
|     | - Bupati                     | /Stel  | 10.000.000      |
|     | - Wakil Bupati               | /Stel  | 8.000.000       |
|     | - Ketua DPRD                 | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Sekretaris Daerah          | /Stel  | 7.000.000       |
|     | - Wakil Ketua DPRD           | /Stel  | 6.000.000       |
|     | - Anggota DPRD               | /Stel  | 4.000.000       |
| 6.  | Pakaian Kerja Lapangan (PKL) |        |                 |

| No. | Uraian                         | Satuan | Biaya T.A. 2020 |
|-----|--------------------------------|--------|-----------------|
|     | - Ketua DPRD                   | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Wakil Ketua DPRD             | /Stel  | 6.000.000       |
|     | - Anggota DPRD                 | /Stel  | 4.000.000       |
| 7.  | Pakaian Adat/Tenun             |        |                 |
|     | - Bupati                       | /Stel  | 10.000.000      |
|     | - Wakil Bupati                 | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Ketua DPRD                   | /Stel  | 7.500.000       |
|     | - Sekretaris Daerah            | /Stel  | 5.500.000       |
|     | - Wakil Ketua DPRD             | /Stel  | 3.500.000       |
|     | - Anggota DPRD                 | /Stel  | 2.500.000       |
| 8.  | Pakaian Dinas Harian Pegawai   |        |                 |
|     | - Pakaian Khaki                | /Stel  | 610.000,00      |
|     | - Pakaian Hitam Putih          | /Stel  | 610.000,00      |
|     | - Pakaian Adat/Tenun           | /Stel  | 500.000,00      |
|     | - Pakaian Kerja Lapangan (PKL) | /Stel  | 500.000,00      |
|     | - Pakaian Olahraga             | /Stel  | 450.000,00      |

## B. SATUAN BIAYA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020

### 1. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural

- 1.1. Diklat Pimpinan Tk. II Rp. 35.000.000/Peserta
- 1.2. Diklat Pimpinan Tk. III Rp. 25.000.000/Peserta
- 1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV Rp. 20.000.000/Peserta

### 2. Satuan biaya latihan prajabatan

- 2.1. Golongan I dan II Rp. 4.470.000/Peserta
- 2.2. Golongan III Rp. 5.545.000/Peserta

### 3. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

- 3.1. Inventaris Kantor Rp. 80.000 (Pegawai/Tahun)
- 3.2. Personal Komputer/ *Notebook* Rp. 730.000 (Unit/Tahun)
- 3.3. Printer Rp. 690.000 (Unit/Tahun)
- 3.4. AC Split Rp. 610.000 (Unit/Tahun)
- 3.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA Rp. 7.190.000 (Unit/Tahun)
- 3.6. Genset 75 KVA Rp. 8.640.000 (Unit/Tahun)
- 3.7. Genset 100 KVA Rp. 10.150.000 (Unit/Tahun)
- 3.8. Genset 125 KVA Rp. 10.780.000 (Unit/Tahun)
- 3.9. Genset 150 KVA Rp. 13.260.000 (Unit/Tahun)
- 3.10. Genset 175 KVA Rp. 14.810.000 (Unit/Tahun)
- 3.11. Genset 200 KVA Rp. 15.850.000 (Unit/Tahun)
- 3.12. Genset 250 KVA Rp. 16.790.000 (Unit/Tahun)

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 3.13. Genset 275 KVA   | Rp. 17.760.000 (Unit/Tahun) |
| 3.14. Genset 300 KVA   | Rp. 20.960.000 (Unit/Tahun) |
| 3.15. Genset 350 KVA   | Rp. 22.960.000 (Unit/Tahun) |
| 3.16. Genset 450 KVA   | Rp. 22.620.000 (Unit/Tahun) |
| 3.17. Genset 500 KVA   | Rp. 31.770.000 (Unit/Tahun) |
| <b>4. Satuan biaya penerjemah dan pengetikan</b>                             |                             |
| 4.1. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya                   |                             |
| a. Bahasa Inggris  | Rp. 250.000/Halaman Jadi    |
| b. Bahasa Jepang   | Rp. 400.000/Halaman Jadi    |
| c. Bahasa Mandarin   | Rp. 410.000/Halaman Jadi    |
| d. Bahasa Belanda  | Rp. 450.000/Halaman Jadi    |
| e. Bahasa Perancis   | Rp. 366.000/Halaman Jadi    |
| f. Bahasa Jerman   | Rp. 414.000/Halaman Jadi    |
| g. Bahasa Asing Lainnya  | Rp. 300.000/Halaman Jadi    |
| 4.2. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya     |                             |
|  | Rp. 174.000/Halaman Jadi    |
| <b>5. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri</b> |                             |
| 5.1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I                          |                             |
| 5.1.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional                                     |                             |
| a. Diploma I dan III   | Rp. 16.070.000 (OT)         |
| b. Diploma IV dan Strata I   | Rp. 17.010.000 (OT)         |
| 5.1.2. Uang Buku dan Referensi   |                             |
| a. Diploma I   | Rp. 1.330.000 (OT)          |
| b. Diploma III   | Rp. 1.590.000 (OT)          |
| c. Diploma IV dan Strata I   | Rp. 1.850.000 (OT)          |
| 5.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2                                 |                             |
| 5.2.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional                                     |                             |
| a. Strata 2 dan Spesialis 1  | Rp. 20.690.000 (OT)         |
| b. Strata 3 dan Spesialis 2  | Rp. 21.320.000 (OT)         |
| 5.2.2. Uang Buku dan Referensi   |                             |
| a. Strata 2 dan Spesialis 1  | Rp. 2.120.000 (OT)          |
| b. Strata 3 dan Spesialis 2  | Rp. 2.380.000 (OT)          |
| <b>6. Satuan biaya bantuan tugas belajar</b>                                 |                             |
| 6.1. Untuk jenjang S1  |                             |
| a. SPP per Tahun   | Rp. 5.000.000 (OT)          |
| b. Uang Saku   | Rp. 1.500.000 (OB)          |
| c. Bahan Literatur   | Rp. 2.500.000 (OT)          |
| 6.2. Untuk jenjang S2  |                             |
| a. SPP per Tahun   | Rp. 15.000.000 (OT)         |
| b. Uang Saku   | Rp. 1.500.000 (OB)          |
| c. Bahan Literatur   | Rp. 8.500.000 (OT)          |



|   |            |            |              |  |
|---|------------|------------|--------------|--|
| 6.3. Untuk jenjang S3   |            |            |              |  |
| a. SPP per Tahun  | Rp.        | 30.000.000 | (OT)         |  |
| b. Uang Saku  | Rp.        | 1.500.000  | (OB)         |  |
| c. Bahan Literatur  | Rp.        | 10.500.000 | (OT)         |  |
| d. Biaya Riset  | Rp.        | 15.000.000 | (OT)         |  |
| 6.4. Untuk Pendidikan Dokter Spesialis                                    | Rp.        | 50.000.000 | (OT)         |  |
| 7. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar                            |            |            |              |  |
| 7.1. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar S1                       | Rp.        | 20.000.000 | (OT)         |  |
| 7.2. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar S2                       | Rp.        | 25.000.000 | (OT)         |  |
| 7.3. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar S3                       | Rp.        | 80.000.000 | (OT)         |  |
| 8. Satuan biaya sewa mesin <i>fotocopy</i>                                |            |            |              |  |
| 8.1. Mesin Fotocopy <i>Analog</i>   | Rp.        | 4.200.000  | (Unit/Bulan) |  |
| 8.2. Mesin Fotocopy <i>Digital</i>  | Rp.        | 5.500.000  | (Unit/Bulan) |  |
| 9. Satuan Biaya Bahan Makanan, Konsumsi Rapat dan <i>Rescue Team</i>      |            |            |              |  |
| 9.1. Pengadaan Bahan Makanan  |            |            |              |  |
| 1. Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit                                 | OH         | Rp.        | 36.000       |  |
| 2. Bahan Makanan Untuk Pasien Puskesmas                                   | OH         | Rp.        | 36.000       |  |
| 3. Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial                  | OH         | Rp.        | 30.000       |  |
| 9.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat  |            |            |              |  |
| 1. Makan  | OK         | Rp.        | 42.000       |  |
| 2. Kudapan ( <i>Snack</i> )   | OK         | Rp.        | 20.000       |  |
| 9.3. Pengadaan Bahan Makanan Untuk <i>Rescue Team</i>                     | OH         | Rp.        | 41.000       |  |
| 10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas             |            |            |              |  |
| 10.1. Kendaraan Dinas Pejabat (Unit/Tahun)                                |            |            |              |  |
| a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati   |            | Rp.        | 60.000.000   |  |
| b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati dan Ketua DPRD                    |            | Rp.        | 50.000.000   |  |
| c. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD dan Eselon II A               |            | Rp.        | 45.000.000   |  |
| d. Kendaraan Dinas Eselon II B  |            | Rp.        | 38.000.000   |  |
| e. Kendaraan Dinas Eselon III   |            | Rp.        | 34.880.000   |  |
| f. Kendaraan Dinas Eselon IV  |            | Rp.        | 4.800.000    |  |
| 10.2. Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor dan <i>Speed Boat</i> |            |            |              |  |
| a. Kendaraan operasional dalam Lingkungan Kantor                          | Unit/Tahun | Rp.        | 9.750.000    |  |
| b. Kendaraan operasional Roda 6 (Enam)/ <i>Double Gardan</i> ke Atas      | Unit/Tahun | Rp.        | 37.210.000   |  |
| c. Kendaraan operasional Roda 2 (Dua)                                     | Unit/Tahun | Rp.        | 3.940.000    |  |
| d. <i>Speed Boat</i>  | Unit/Tahun | Rp.        | 20.240.000   |  |

### 10.3. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

| No. | Uraian                      | Satuan     | Roda Empat | Double Gardan | Roda Dua   |
|-----|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1.  | Kendaraan Dinas Operasional | Unit/Tahun | 78.920.000 | 89.710.000    | 48.200.000 |

### 10.4. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa :

|                                    |            |     |            |
|------------------------------------|------------|-----|------------|
| - Pejabat Negara                   | Unit/tahun | Rp. | 30.000.000 |
| - Eselon II                        | Unit/tahun | Rp. | 27.000.000 |
| - Operasional Kantor atau Lapangan | Unit/tahun | Rp. | 25.000.000 |

### 10.5. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m<sup>2</sup>)

| Satuan                | Gedung Bertingkat | Gedung Tidak Bertingkat | Halaman Gedung/Bangunan Kantor |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| m <sup>2</sup> /tahun | 197.000           | 144.000                 | 10.000                         |

### 10.6. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Perhari)

|                         |         |     |            |
|-------------------------|---------|-----|------------|
| - Sewa Gedung Pertemuan | Perhari | Rp. | 14.063.000 |
|-------------------------|---------|-----|------------|

### 10.7. Biaya Desain (Perencanaan) dan Biaya Supervisi (Pengawasan)

Biaya desain (perencanaan) dan biaya Supervisi (pengawasan) berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan sesuai kemampuan daerah.

#### 10.7.1. Biaya *Desain* (Perencanaan)

- Nilai Pagu Anggaran = 5 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 0 s/d Rp. 250 Juta
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 4 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 3 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 2 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar
- Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar = 1,5 % dari Pagu Anggaran

#### 10.7.2. Biaya *Supervisi* (Pengawasan)

- Nilai Pagu Anggaran = 4 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 0 s/d Rp. 200 Juta
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 3 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 2 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
- Nilai Pagu Anggaran diatas = 1,5 % dari Pagu Anggaran  
Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 Milyar
- Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar = 1,5 % dari Pagu Anggaran

#### 10.8. Satuan Biaya Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan harga yang terdapat dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan *e-Katalog* LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

### C. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA





1. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD berpedoman Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Penganggaran Dana Kapitasi JKN  
Hal-hal yang terkait dengan penganggaran dana kapitasi JKN :
  - a. Kepala FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada OPD Dinas Kesehatan.
  - b. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-OPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
  - c. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis lain-lain PAD, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
  - d. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya berpedoman ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 pada FKTP milik pemerintah daerah.
3. Bagi OPD atau unit kerja pada OPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :
  - a. Penyusunan RKA dalam Pelaksanaan APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - b. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses Pelaksanaan APBD.

4. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :
- a. Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 'a) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.
  - c. Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'a) atau butir 'b), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS.
  - d. Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c), dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
  - e. Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c) kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten.
  - f. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'e), Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA-OPD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.
  - g. Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
  - h. Rencana belanja Dana BOS pada RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.
  - i. RKA-OPD sebagaimana dimaksud butir 'f) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

j. Singkatan satuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Demikian untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| INSTANSI         | PARAF   |
| 1. SEKDA         |   |
| 2. ASISTEN III   |   |
| 3. KEPALA BKAD   |  |
| 4. KABAG HUKUM   |  |
| 5.               |   |
| 6.               |   |

**Plt. BUPATI KONAWE SELATAN,**



# **LAMPIRAN VI**

**STANDAR**

**BIAYA PENUNJANG KEGIATAN**

**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONawe SELATAN**

**NOMOR : 56 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 25 NoreMBER 2020**

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONawe SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN**

**A. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada ASN maupun Non ASN dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pedoman ini.
2. Belanja adalah jumlah uang yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.
3. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
6. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bendahara penerimaan adalah bendahara fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada OPD.

10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
13. Staf administrasi (Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan) adalah ASN yang membantu pelaksanaan fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD.
14. Operator Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi adalah ASN/Non ASN yang melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada OPD.

**B. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA**

**1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Kegiatan-Kegiatan Lainnya**

**1.1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPKD**

| NO. | PENGELOLA                                       | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.  | Honorarium Bendahara Umum Daerah                | OB     | 3.500.000    |
| 2.  | Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah          | OB     | 2.500.000    |
| 3.  | Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah | OB     | 1.000.000    |
| 4.  | Honorarium Bendahara Pengeluaran PPKD           | OB     | 1.500.000    |
| 5.  | Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD  | OB     | 1.000.000    |

**1.2. Honorarium Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi**

| NO. | PENGELOLA   | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.  | Honorarium Pembina  | OB     | 1.850.000    |
| 2.  | Honorarium Wakil Pembina  | OB     | 1.500.000    |
| 3.  | Honorarium Supervisor   | OB     | 1.250.000    |
| 4.  | Honorarium Administrator  | OB     | 1.000.000    |
| 5.  | Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah dan Aplikasi Kementerian |        |              |
|     | - Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah                        | OB     | 1.000.000    |
|     | - Honorarium Operator Aplikasi Kementerian                              | OB     | 1.000.000    |



### 1.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| NO. | PENGELOLA      | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua TAPD     | OK     | 9.000.000    |
| 2.  | Sekretaris     | OK     | 7.500.000    |
| 3.  | Anggota        | OK     | 6.500.000    |
| 4.  | Staf Pendukung | OK     | 2.000.000    |

### 1.4. Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Daerah

| NO. | PENGELOLA  | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua TP2D | OK     | 9.000.000    |
| 2.  | Sekretaris | OK     | 7.500.000    |
| 3.  | Anggota    | OK     | 3.250.000    |

### 1.5. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

| NO. | PENGELOLA      | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua Tim LKPD | OK     | 7.000.000    |
| 2.  | Wakil Ketua    | OK     | 6.500.000    |
| 3.  | Sekretaris     | OK     | 5.100.000    |
| 4.  | Anggota        | OK     | 4.800.000    |

### 1.6. Honorarium Tim Pembebasan Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan Yang Terkena Dampak Pemerintah Daerah

| NO. | PENGELOLA                      | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|--------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua                          | OK     | 2.000.000    |
| 2.  | Sekretaris                     | OK     | 2.000.000    |
| 3.  | Anggota                        | OK     | 1.500.000    |
| 4.  | Anggota Staf Pembebasan        | OK     | 1.000.000    |
| 5.  | Tenaga Tekhnis Pengukur Tanah  | OB     | 2.000.000    |
| 6.  | Tenaga Pembantu Pengukur Tanah | OB     | 1.500.000    |

1.7. Honorarium Tim Terpadu dan Penanganan Sengketa Tanah/Lahan Wilayah Pemerintah Daerah

| NO. | PENGELOLA             | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|-----------------------|--------|--------------|
| 1.  | Pelindung / Penasehat | OK     | 8.000.000    |
| 2.  | Pembina / Pengarah    | OK     | 7.000.000    |
| 3.  | Ketua                 | OK     | 6.000.000    |
| 4.  | Wakil Ketua           | OK     | 6.500.000    |
| 5.  | Sekretaris            | OK     | 5.000.000    |
| 6.  | Anggota               | OK     | 4.000.000    |

1.8. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

| NO. | PENGELOLA        | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|------------------|--------|--------------|
| 1.  | Penanggung Jawab | OK     | 5.000.000    |
| 3.  | Ketua            | OK     | 4.000.000    |
| 4.  | Wakil Ketua      | OK     | 3.500.000    |
| 5.  | Sekretaris       | OK     | 2.500.000    |
| 6.  | Anggota          | OK     | 1.000.000    |

1.9. Honorarium Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Konawe Selatan

| NO. | PENGELOLA          | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|--------------------|--------|--------------|
| 1.  | Penanggung Jawab   | OB     | 900.000      |
| 2.  | Ketua              | OB     | 800.000      |
| 3.  | Sekretaris         | OB     | 700.000      |
| 4.  | Koordinator Bidang | OB     | 600.000      |
| 5.  | Anggota Bappeda    | OB     | 500.000      |
| 6.  | Anggota OPD        | OK     | 300.000      |

1.10. Honorarium Tim Koordinasi Daerah Proyek Dukungan Nasional Bagi Iklim Investasi Lokal Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

| NO. | PENGELOLA  | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua      | OB     | 900.000      |
| 2.  | Sekretaris | OB     | 750.000      |
| 3.  | Anggota    | OB     | 700.000      |

1.11. Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan

| NO. | PENGELOLA | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|-----------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua     | OB     | 850.000      |
| 2.  | Anggota   | OB     | 700.000      |

1.12. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

| NO. | PENGELOLA        | SATUAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|------------------|--------|--------------|
| 1.  | Ketua            | OK     | 4.000.000    |
| 2.  | Pelaksana Harian | OK     | 3.500.000    |
| 3.  | Wakil Ketua      | OK     | 3.000.000    |
| 4.  | Sekretaris       | OK     | 2.500.000    |
| 5.  | Anggota          | OK     | 2.000.000    |

1.13. Honorarium Tim Penyusun Laporan Kabupaten Peduli HAM

| NO. | PENGELOLA   | SATUAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|--------|-------------|
| 1.  | Ketua       | OK     | 5.000.000   |
| 2.  | Wakil Ketua | OK     | 4.500.000   |
| 3.  | Sekretaris  | OK     | 3.000.000   |
| 4.  | Anggota     | OK     | 2.500.000   |

1.14. Honorarium Tim e-Formasi Birokrasi

| NO. | PENGELOLA        | SATUAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------|--------|-------------|
| 1.  | Penanggung Jawab | OB     | 2.000.000   |
| 2.  | Ketua            | OB     | 1.500.000   |
| 3.  | Sekretaris       | OB     | 1.200.000   |
| 4.  | Anggota          | OB     | 1.000.000   |

1.15. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)  
Kabupaten Konawe Selatan

| NO. | PENGELOLA   | SATUAN | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------|--------|-------------|
| 1.  | Ketua       | OB     | 1.750.000   |
| 2.  | Wakil Ketua | OB     | 1.500.000   |
| 3.  | Sekretaris  | OB     | 1.500.000   |
| 4.  | Anggota     | OB     | 1.250.000   |

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

2.1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)

|    |  |    |     |           |
|----|--|----|-----|-----------|
| a. | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                         | OB | Rp. | 1.040.000 |
| b. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta     | OB | Rp. | 1.250.000 |
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta     | OB | Rp. | 1.450.000 |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OB | Rp. | 1.660.000 |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OB | Rp. | 1.970.000 |
| f. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OB | Rp. | 2.280.000 |
| g. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OB | Rp. | 2.590.000 |
| h. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OB | Rp. | 3.010.000 |
| i. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 3.420.000 |
| j. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 3.840.000 |
| k. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 4.250.000 |
| l. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OB | Rp. | 4.770.000 |
| m. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 5.290.000 |
| n. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 5.810.000 |

|   |    |     |           |
|---|----|-----|-----------|
| o. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun       | OB | Rp. | 6.330.000 |
| p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                             | OB | Rp. | 7.370.000 |
| <b>2.2. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>                    |    |     |           |
| a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                                 | OB | Rp. | 1.010.000 |
| b. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta          | OB | Rp. | 1.210.000 |
| c. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta          | OB | Rp. | 1.410.000 |
| d. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar          | OB | Rp. | 1.610.000 |
| e. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar        | OB | Rp. | 1.910.000 |
| f. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar        | OB | Rp. | 2.210.000 |
| g. <i>Nilai Pagu Anggaran diatas<br/>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar</i> | OB | Rp. | 2.520.000 |
| h. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar        | OB | Rp. | 2.920.000 |
| i. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar        | OB | Rp. | 3.320.000 |
| j. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar        | OB | Rp. | 3.720.000 |
| k. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar       | OB | Rp. | 4.130.000 |
| l. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar      | OB | Rp. | 4.630.000 |
| m. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar      | OB | Rp. | 5.130.000 |
| n. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar      | OB | Rp. | 5.640.000 |
| o. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun       | OB | Rp. | 6.140.000 |
| p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                             | OB | Rp. | 7.140.000 |
| <b>2.3. Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)</b>         |    |     |           |
| a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                                 | OB | Rp. | 460.800   |
| b. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta          | OB | Rp. | 566.400   |
| c. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta          | OB | Rp. | 679.000   |
| d. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar          | OB | Rp. | 768.000   |
| e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar<br>s/d Rp. 2,5 Milyar        | OB | Rp. | 902.400   |
| f. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar        | OB | Rp. | 1.027.200 |
| g. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar         | OB | Rp. | 1.161.600 |
| h. Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar        | OB | Rp. | 1.468.800 |

|  |   |    |     |           |
|--|---|----|-----|-----------|
| i.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 1.776.000 |
| j.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 2.083.200 |
| k.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 2.390.400 |
| l.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OB | Rp. | 2.860.800 |
| m.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 3.321.600 |
| n.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 3.782.400 |
| <b>2.4. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM</b> |   |    |     |           |
| a.   | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                            | OB | Rp. | 400.000   |
| b.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta     | OB | Rp. | 480.000   |
| c.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta     | OB | Rp. | 570.000   |
| d.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OB | Rp. | 660.000   |
| e.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OB | Rp. | 770.000   |
| f.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OB | Rp. | 880.000   |
| g.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OB | Rp. | 990.000   |
| h.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OB | Rp. | 1.250.000 |
| i.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 1.520.000 |
| j.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 1.780.000 |
| k.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 2.040.000 |
| l.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OB | Rp. | 2.440.000 |
| m.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 2.830.000 |
| n.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 3.230.000 |
| o.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun  | OB | Rp. | 3.620.000 |
| p.   | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                        | OB | Rp. | 4.420.000 |
| <b>2.5. Bendahara Pengeluaran OPD</b>                                  |   |    |     |           |
| a.   | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                            | OB | Rp. | 340.000   |
| b.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta     | OB | Rp. | 420.000   |
| c.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta     | OB | Rp. | 500.000   |
| d.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OB | Rp. | 570.000   |

|   |   |    |     |           |
|---|---|----|-----|-----------|
| e.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OB | Rp. | 670.000   |
| f.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OB | Rp. | 770.000   |
| g.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OB | Rp. | 860.000   |
| h.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OB | Rp. | 1.090.000 |
| i.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 1.320.000 |
| j.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 1.550.000 |
| k.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 1.780.000 |
| l.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OB | Rp. | 2.120.000 |
| m.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 2.470.000 |
| n.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 2.810.000 |
| o.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun  | OB | Rp. | 3.160.000 |
| p.  | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                        | OB | Rp. | 3.840.000 |
| 2.5.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD |   |    |     |           |
| a.  | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta                            | OB | Rp. | 260.000   |
| b.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta     | OB | Rp. | 310.000   |
| c.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta     | OB | Rp. | 370.000   |
| d.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OB | Rp. | 430.000   |
| e.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OB | Rp. | 500.000   |
| f.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OB | Rp. | 570.000   |
| g.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OB | Rp. | 640.000   |
| h.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OB | Rp. | 810.000   |
| i.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 980.000   |
| j.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 1.150.000 |
| k.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 1.330.000 |
| l.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp.250 Milyar  | OB | Rp. | 1.580.000 |
| m.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 1.840.000 |
| n.  | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 2.090.000 |

|  |  |    |     |           |
|--|--|----|-----|-----------|
| o.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun                 | OB | Rp. | 2.350.000 |
| p.   | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                                       | OB | Rp. | 2.860.000 |
| <b>2.6. Bendahara Penerimaan OPD</b>       |  |    |     |           |
| a.   | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta   | OB | Rp. | 340.000   |
| b.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta                    | OB | Rp. | 420.000   |
| c.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta                    | OB | Rp. | 500.000   |
| d.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar                    | OB | Rp. | 570.000   |
| e.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar                  | OB | Rp. | 730.000   |
| f.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar                  | OB | Rp. | 880.000   |
| g.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar                   | OB | Rp. | 1.030.000 |
| h.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar                  | OB | Rp. | 1.260.000 |
| i.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar                  | OB | Rp. | 1.490.000 |
| j.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar                  | OB | Rp. | 1.720.000 |
| k.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar                 | OB | Rp. | 1.950.000 |
| l.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar                | OB | Rp. | 2.260.000 |
| m.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar                | OB | Rp. | 2.560.000 |
| n.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar                | OB | Rp. | 2.870.000 |
| o.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun                 | OB | Rp. | 3.170.000 |
| p.   | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                                       | OB | Rp. | 3.790.000 |
| <b>3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b> |  |    |     |           |
| 3.1.                                       | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  | OB | Rp. | 680.000   |
| 3.2.                                       | Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan<br>(Konstruksi) : |    |     |           |
| a.   | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta   | OP | Rp. | 680.000   |
| b.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta                    | OP | Rp. | 850.000   |
| c.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar                    | OP | Rp. | 1.020.000 |
| d.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar                  | OP | Rp. | 1.270.000 |
| e.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar                  | OP | Rp. | 1.520.000 |
| f.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar                   | OP | Rp. | 1.780.000 |
| g.   | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar                  | OP | Rp. | 2.120.000 |



|    |   |    |     |           |
|----|---|----|-----|-----------|
| h. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OP | Rp. | 2.450.000 |
| i. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp.50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar    | OP | Rp. | 2.790.000 |
| j. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp.75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar   | OP | Rp. | 3.130.000 |
| k. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OP | Rp. | 3.580.000 |
| l. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp.250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar  | OP | Rp. | 4.030.000 |
| m. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OP | Rp. | 4.490.000 |
| n. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun  | OP | Rp. | 4.940.000 |
| o. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                        | OP | Rp. | 5.560.000 |

3.3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) :

|    |   |    |     |           |
|----|---|----|-----|-----------|
| a. | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta                            | OP | Rp. | 760.000   |
| b. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta     | OP | Rp. | 760.000   |
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OP | Rp. | 920.000   |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OP | Rp. | 1.140.000 |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OP | Rp. | 1.370.000 |
| f. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OP | Rp. | 1.600.000 |
| g. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OP | Rp. | 1.910.000 |
| h. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OP | Rp. | 2.210.000 |
| i. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OP | Rp. | 2.520.000 |
| j. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OP | Rp. | 2.820.000 |
| k. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OP | Rp. | 3.230.000 |
| l. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OP | Rp. | 3.640.000 |
| m. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OP | Rp. | 4.040.000 |
| n. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun  | OP | Rp. | 4.450.000 |
| o. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                        | OP | Rp. | 5.010.000 |

4. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Arsiparis, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengawas Lapangan/Koordinator (Direksi), Petugas Peneliti Kontrak, Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD, Panitia Lelang BMD, Honorarium Panitia Penguji Kendaraan, Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL), Honorarium Staf PPK, Honorarium Tenaga IT (*Technology Infomation*), Honorarium Pembantu Lapangan, Admin RUP OPD, Honorarium Tekhnisi Komputer, Montir/Operator Alat Berat Dibayarkan dengan nilai maksimal :

|    |  |    |           |
|----|--|----|-----------|
| a. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan        | OB | 1.200.000 |
| b. | Honorarium Arsiparis                             | OB | 1.500.000 |
| c. | Honorarium Pengurus Barang                       |    |           |
|    | - Nilai aset tetap ≤ 1 milyar                    | OB | 1.000.000 |
|    | - Nilai aset tetap 1 ≤ 10 milyar                 | OB | 1.200.000 |
|    | - Nilai aset tetap 10 ≤ 25 milyar                | OB | 1.400.000 |
|    | - Nilai aset tetap 25 ≤ 50 milyar                | OB | 1.600.000 |
|    | - Nilai Aset tetap 50 ≤ 100 milyar               | OB | 1.800.000 |
|    | - Nilai aset tetap 100 milyar lebih              | OB | 2.000.000 |
| d. | Honorarium Pembantu Pengurus Barang              |    |           |
|    | - Nilai aset tetap ≤ 1 milyar                    | OB | 750.000   |
|    | - Nilai aset tetap 1 ≤ 10 milyar                 | OB | 1.000.000 |
|    | - Nilai aset tetap 10 ≤ 25 milyar                | OB | 1.250.000 |
|    | - Nilai aset tetap 25 ≤ 50 milyar                | OB | 1.500.000 |
|    | - Nilai Aset tetap 50 ≤ 100 milyar               | OB | 1.600.000 |
|    | - Nilai aset tetap 100 milyar lebih              | OB | 1.800.000 |
| e. | Honorarium Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD |    |           |
|    | - Ketua  | OK | 2.500.000 |
|    | - Sekretaris                                     | OK | 2.000.000 |
|    | - Ketua Pelaksana                                | OK | 1.500.000 |
|    | - Anggota  | OK | 1.000.000 |
|    | - Tenaga Teknis                                  | OK | 1.000.000 |
| f. | Honorarium Panitia Lelang BMD                    |    |           |
|    | - Ketua  | OK | 2.500.000 |
|    | - Sekretaris                                     | OK | 2.000.000 |
|    | - Anggota  | OK | 1.500.000 |
| g. | Honorarium Panitia Penguji Kendaraan             |    |           |
|    | - Ketua  | OK | 1.000.000 |
|    | - Anggota  | OK | 750.000   |
| h. | Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL)           |    |           |
|    | - Ketua / Anggota                                | OK | 2.500.000 |
| i. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang                  |    |           |
|    | - Ketua  | OB | 1.500.000 |
|    | - Sekretaris                                     | OB | 1.000.000 |
|    | - Anggota  | OB | 750.000   |
| j. | Honorarium Pengelola Website                     |    |           |
|    | - Penanggung jawab                               | OB | 1.000.000 |
|    | - Redaktur                                       | OB | 950.000   |
|    | - Editor   | OB | 900.000   |
|    | - Web admin                                      | OB | 850.000   |
|    | - Web developer                                  | OB | 750.000   |

|    |  |    |           |
|----|--|----|-----------|
|    | - Pembuat Artikel  | OB | 200.000   |
| k. | Honorarium Pengawas Lapangan/Koordinator (Direksi)                               | OB | 2.500.000 |
| l. | Honorarium Petugas Peneliti Kontrak  |    |           |
|    | - Ketua  | OB | 1.000.000 |
|    | - Sekretaris   | OB | 850.000   |
|    | - Anggota  | OB | 700.000   |
| m. | Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pengoreksi, Verifikasi, Akuntan) | OB | 750.000   |
| n. | Honorarium Tenaga IT ( <i>Technology Infomation</i> )                            | OB | 2.000.000 |
| o. | Honorarium Pembantu Lapangan   | OB | 750.000   |
| p. | Honorarium Admin RUP OPD   | OB | 700.000   |
| q. | Honorarium Teknisi Komputer, Listrik, DLL  | OB | 1.500.000 |
| r. | Honorarium Montir/Operator Alat Berat  | OB | 1.000.000 |
| s. | Honorarium Operator Listrik/Mesin  | OB | 750.000   |

#### 4.1. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP/LPSE)

|    |  |    |           |
|----|--|----|-----------|
| a. | Kepala Unit Layanan Pengadaan                          | OB | 7.000.000 |
| b. | Pokja Unit Layanan Pengadaan                           | OB | 5.000.000 |
| c. | Staf Pendukung Sekretariat ULP                         | OB | 1.500.000 |
| d. | Admin <i>Agency</i>                                    | OB | 1.500.000 |
| e. | Kepala LPSE  | OB | 3.500.000 |
| f. | Sekretaris   | OB | 3.500.000 |
| g. | Koordinator Bidang                                     | OB | 2.500.000 |
| h. | Anggota  | OB | 2.500.000 |
| i. | Honorarium Komite Kode Etik                            |    |           |
|    | - Ketua  | OB | 3.000.000 |
|    | - Sekretaris   | OB | 2.500.000 |
|    | - Anggota  | OB | 2.000.000 |
| j. | Honorarium Tim Verifikasi Jabatan Fungsional (Jabfung) |    |           |
|    | - Ketua  | OB | 3.000.000 |
|    | - Sekretaris   | OB | 2.500.000 |
|    | - Anggota  | OB | 2.000.000 |

#### 4.2. Honorarium Pokja Pendampingan dan Pemanfaatan Aplikasi Terintegrasi

|    |                                   |    |           |
|----|-----------------------------------|----|-----------|
| a. | Ketua Pokja                       | OB | 5.000.000 |
| b. | Wakil Ketua Pokja Pelaporan       | OB | 5.000.000 |
| c. | Wakil Ketua Pokja Perencanaan     | OB | 5.000.000 |
| d. | Wakil Ketua Pokja Penganggaran    | OB | 5.000.000 |
| e. | Wakil Ketua Pokja <i>Sistem</i>   | OB | 5.000.000 |
| f. | PIC ( <i>Personal In Charge</i> ) | OB | 3.500.000 |
| g. | <i>Administrator</i>              | OB | 3.500.000 |
| h. | Koordinator                       | OB | 3.500.000 |
| i. | Anggota                           | OB | 1.500.000 |

#### 4.3. Honorarium Jasa Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis

|    |                                   |    |            |
|----|-----------------------------------|----|------------|
| a. | Dokter Spesialis                  | OB | 25.000.000 |
| b. | Dokter Umum                       |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil | OB | 11.000.000 |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil        | OB | 8.500.000  |

|    |                                      |    |            |
|----|--------------------------------------|----|------------|
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 7.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 6.000.000  |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 6.000.000  |
| c. | Dokter Gigi                          |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 11.000.000 |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 8.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 7.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 6.000.000  |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 6.000.000  |
| d. | Tenaga Perawat / Penata Anastesi     |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 2.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 1.750.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 1.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 1.200.000  |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 1.750.000  |
| e. | Tenaga Apoteker                      |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 2.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 1.750.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 1.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 1.200.000  |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 1.750.000  |
| f. | Tenaga Perawat/Bidan                 |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 1.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 1.250.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 1.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 750.000    |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 1.000.000  |
| g. | Tenaga Kesehatan Lainnya             |    |            |
|    | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 1.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 1.250.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perdesaan           | OB | 1.000.000  |
|    | - Kawasan Daerah Perkotaan           | OB | 750.000    |
|    | - Rumah Sakit Umum Daerah            | OB | 1.000.000  |
|    | - Pendamping Akreditasi              | OJ | 350.000    |
|    | - Biaya Piket/Jaga Petugas Puskesmas | OK | 30.000     |
| h. | Tenaga Petugas ISPRS                 |    |            |
|    |                                      | OB | 1.000.000  |
| i. | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil    | OB | 1.500.000  |
|    | - Kawasan Daerah Terpencil           | OB | 1.250.000  |

#### 4.4. Honorarium Jasa Tenaga Pendidik

|              |                                   |    |           |
|--------------|-----------------------------------|----|-----------|
| Guru Non ASN |                                   |    |           |
|              | - Kawasan Daerah Sangat Terpencil | OB | 2.500.000 |
|              | - Kawasan Daerah Terpencil        | OB | 2.000.000 |
|              | - Kawasan Daerah Perdesaan        | OB | 1.500.000 |
|              | - Kawasan Daerah Perkotaan        | OB | 1.000.000 |

#### 4.5. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besaran biaya tersebut ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun anggaran, dengan rincian :

|    |              |    |            |
|----|--------------|----|------------|
| a. | Bupati       | OB | 20.000.000 |
| b. | Wakil Bupati | OB | 13.300.000 |

#### 4.6. General Chek Up Dan Pengobatan/Perawatan

|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| a. | Bupati       | OT | 150.000.000 |
| b. | Wakil Bupati | OT | 100.000.000 |

#### 4.7. General Chek Up

|    |                  |    |            |
|----|------------------|----|------------|
| a. | Ketua DPRD       | OT | 20.000.000 |
| b. | Wakil Ketua DPRD | OT | 15.000.000 |
| c. | Anggota DPRD     | OT | 10.000.000 |

#### 4.8. Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH Dan Pimpinan DPRD

|    |                  |    |            |
|----|------------------|----|------------|
| a. | Bupati           | OB | 95.000.000 |
| b. | Wakil Bupati     | OB | 75.000.000 |
| c. | Ketua DPRD       | OB | 75.000.000 |
| d. | Wakil Ketua DPRD | OB | 50.000.000 |

#### 4.9. Tunjangan Anggota DPRD

|    |                        |    |            |
|----|------------------------|----|------------|
| a. | Tunjangan Perumahan    | OB | 7.500.000  |
| b. | Tunjangan Transportasi | OB | 12.000.000 |

#### 4.10. Insentif Bagi OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Insentif Bagi OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- Bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif;
- Besarnya Insentif ditetapkan 5% (*lima per seratus*) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- Besarnya pembayaran insentif untuk setiap triwulan dapat diberi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 4.11. Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan

##### 4.11.1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :

OB Rp. 420.000

##### 4.11.2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :

a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta OB Rp. 420.000

b. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp. 520.000

Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta

|    |   |    |     |           |
|----|---|----|-----|-----------|
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar     | OB | Rp. | 620.000   |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar   | OB | Rp. | 770.000   |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar   | OB | Rp. | 910.000   |
| f. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar    | OB | Rp. | 1.060.000 |
| g. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar   | OB | Rp. | 1.260.000 |
| h. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar   | OB | Rp. | 1.450.000 |
| i. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar   | OB | Rp. | 1.650.000 |
| j. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar  | OB | Rp. | 1.840.000 |
| k. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar | OB | Rp. | 2.100.000 |
| l. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar | OB | Rp. | 2.370.000 |
| m. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar | OB | Rp. | 2.630.000 |
| n. | Nilai Pagu Anggaran diatas<br>Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun  | OB | Rp. | 2.890.000 |
| o. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun                        | OB | Rp. | 3.250.000 |

4.12. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

|         |  |    |     |           |
|---------|--|----|-----|-----------|
| 4.12.1. | Honorarium Narasumber/Pembahas             |    |     |           |
| a.      | Pejabat Negara Lainnya/yang<br>disetarakan | OJ | Rp. | 1.700.000 |
| b.      | Pejabat Eselon I/yang disetarakan          | OJ | Rp. | 1.400.000 |
| c.      | Pejabat Eselon II/yang disetarakan         | OJ | Rp. | 1.000.000 |
| d.      | Pejabat Eselon III/yang disetarakan        | OJ | Rp. | 900.000   |
| 4.12.2. | Honorarium Moderator                       | OK | Rp. | 700.000   |
| 4.12.3. | Honorarium Pembawa Acara                   | OK | Rp. | 400.000   |
| 4.12.4. | Honorarium Panitia                         |    |     |           |
| a.      | Penanggung jawab                           | OK | Rp. | 450.000   |
| b.      | Ketua/Wakil Ketua                          | OK | Rp. | 400.000   |
| c.      | Sekretaris                                 | OK | Rp. | 300.000   |
| d.      | Anggota                                    | OK | Rp. | 300.000   |

4.13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa

|         |                                |    |     |           |
|---------|--------------------------------|----|-----|-----------|
| 4.13.1. | Honorarium Tim Koordinasi SPDT |    |     |           |
| a.      | Ketua                          | OB | Rp. | 1.500.000 |
| b.      | Wakil Ketua                    | OB | Rp. | 1.250.000 |
| c.      | Sekretaris                     | OB | Rp. | 1.250.000 |
| d.      | Anggota                        | OB | Rp. | 1.000.000 |
| 4.13.2. | Honorarium Tim Tekhnis SPDT    |    |     |           |
| a.      | Ketua                          | OB | Rp. | 1.250.000 |
| b.      | Wakil Ketua                    | OB | Rp. | 1.100.000 |

|         |  |                   |               |         |
|---------|--|-------------------|---------------|---------|
|         | c. Sekretaris  | OB                | Rp. 1.100.000 |         |
|         | d. Anggota   | OB                | Rp. 900.000   |         |
| 4.13.3. | Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah                 |                   |               |         |
|         | a. Ketua   | OB                | Rp. 1.500.000 |         |
|         | b. Wakil Ketua   | OB                | Rp. 1.250.000 |         |
|         | c. Sekretaris  | OB                | Rp. 1.250.000 |         |
|         | d. Anggota   | OB                | Rp. 800.000   |         |
| 4.13.4. | Honorarium Tim Pelaksana BKPRD   |                   |               |         |
|         | a. Ketua   | OB                | Rp. 1.500.000 |         |
|         | b. Sekretaris  | OB                | Rp. 850.000   |         |
|         | c. Anggota   | OB                | Rp. 700.000   |         |
| 4.13.5. | Honorarium Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS                                     |                   |               |         |
|         | a. Ketua PAKEM   | OB                | Rp. 700.000   |         |
|         | b. Anggota PAKEM   | OB                | Rp. 650.000   |         |
|         | c. Ketua DPMU  | OB                | Rp. 400.000   |         |
|         | d. Asisten DPMU  | OB                | Rp. 350.000   |         |
| 4.13.6. | Honorarium Tim Pendamping Alokasi Dana Desa                                |                   |               |         |
|         | a. Penanggung Jawab  | OB                | Rp. 2.500.000 |         |
|         | b. Ketua   | OB                | Rp. 2.000.000 |         |
|         | c. Sekretaris  | OB                | Rp. 1.500.000 |         |
|         | d. Anggota   | OB                | Rp. 1.000.000 |         |
| 4.13.7. | Honorarium Aparatur Kelurahan  |                   |               |         |
|         | a. Ketua LPM   | OB                | Rp. 350.000   |         |
|         | b. Kepala Lingkungan   | OB                | Rp. 350.000   |         |
|         | c. Rukun Tetangga (RT)   | OB                | Rp. 250.000   |         |
|         | d. Mangku Adat   | OB                | Rp. 250.000   |         |
|         | e. Imam  | OB                | Rp. 250.000   |         |
|         | f. Guru Mengaji  | OB                | Rp. 250.000   |         |
|         | g. Pendeta   | OB                | Rp. 250.000   |         |
| 4.13.8. | Honorarium Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) |                   |               |         |
|         | a. Ketua   | OB                | Rp. 850.000   |         |
|         | b. Sekretaris  | OB                | Rp. 800.000   |         |
|         | c. Anggota   | OB                | Rp. 750.000   |         |
| 4.14.   | Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vaksinasi                               |                   |               |         |
| 4.14.1. | Tingkat Pendidikan Dasar   |                   |               |         |
|         | a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pelajaran                              | Naskah/           | Rp.           | 150.000 |
|         | b. Pengawas Ujian  | OH                | Rp.           | 240.000 |
|         | c. Pemeriksa Hasil Ujian   | Siswa/ Mata Ujian | Rp.           | 5.000   |
| 4.14.2. | Tingkat Pendidikan Menengah  |                   |               |         |
|         | a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pelajaran                              | Naskah/           | Rp.           | 190.000 |
|         | b. Pengawas Ujian  | OH                | Rp.           | 270.000 |
|         | c. Pemeriksa Hasil Ujian   | Siswa/ Mata Ujian | Rp.           | 7.500   |

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| 4.15. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  |  |         |           |
| 4.15.1.  | Penceramah   | OJP Rp. | 1.000.000 |
| 4.15.2.  | Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara                     | OJP Rp. | 300.000   |
| 4.15.3.  | Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara                    | OJP Rp. | 200.000   |
| 4.16. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara/Non ASN  |  |         |           |
| 4.16.1.  | Golongan I, II dan Non ASN   | OK Rp.  | 35.000    |
| 4.16.2.  | Golongan III   | OK Rp.  | 37.000    |
| 4.16.3.  | Golongan IV  | OK Rp.  | 41.000    |
| 4.17. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN/Non ASN   |  |         |           |
| 4.17.1.  | Uang Lembur  |         |           |
|  | a. Golongan I dan Non ASN  | OJ Rp.  | 13.000    |
|  | b. Golongan II   | OJ Rp.  | 17.000    |
|  | c. Golongan III  | OJ Rp.  | 20.000    |
|  | d. Golongan IV   | OJ Rp.  | 25.000    |
| 4.17.2.  | Uang Makan Lembur  |         |           |
|  | a. Golongan I, II dan Non ASN  | OK Rp.  | 35.000    |
|  | b. Golongan III  | OK Rp.  | 37.000    |
|  | c. Golongan IV   | OK Rp.  | 41.000    |
| Catatan : Batasan Jam Lembur pada hari kerja <i>Senin-Jum'at</i> 4 (Empat) Jam Perhari, dan untuk hari libur <i>Sabtu-Minggu/Tanggal Merah</i> 8 (Delapan) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM, INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA dan Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam Lembur. Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. |  |         |           |
| 4.18. Honorarium Jaga Malam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengamanan Tertutup, Asisten Pribadi, Ajudan, Honorarium <i>Out Sourcing</i> dan Tenaga Administrasi :   |  |         |           |
| 4.18.1.  | Honorarium Jaga Malam  | OB Rp.  | 2.250.000 |
| 4.18.2.  | Honorarium Sopir/Pengemudi :   |         |           |
|  | - Sopir Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD) | OB Rp.  | 3.000.000 |
|  | - Sopir Eselon IIa   | OB Rp.  | 2.150.000 |
|  | - Sopir Eselon IIb   | OB Rp.  | 2.000.000 |
|  | - Sopir Eselon IIIa  | OB Rp.  | 1.800.000 |
|  | - Sopir Eselon IIIb  | OB Rp.  | 1.600.000 |
|  | - Sopir Operasional  | OB Rp.  | 1.500.000 |
| 4.18.3.  | Petugas Kebersihan   | OB Rp.  | 1.500.000 |
| 4.18.4.  | Pramu Bakti  | OB Rp.  | 1.500.000 |
| 4.18.5.  | Pramu Wisma  | OB Rp.  | 1.500.000 |
| 4.18.6.  | Pengamanan Tertutup  | OB Rp.  | 3.000.000 |
| 4.18.7.  | Asisten Pribadi  | OB Rp.  | 3.000.000 |
| 4.18.8.  | Ajudan   | OB Rp.  | 3.000.000 |
| 4.18.9.  | Honorarium <i>Out Sourcing</i>   | OB Rp.  | 1.750.000 |
| 4.18.10.   | Honorarium <i>Out Sourcing Pembantu Auditor</i>                          | OB Rp.  | 2.500.000 |
| 4.18.11.   | Tenaga Administrasi  | OB Rp.  | 1.500.000 |







|   |  |      |                |
|---|--|------|----------------|
| 4.19. Honorarium Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :   |  |      |                |
| 4.19.1.   | Wasit  | OH   | Rp. 200.000    |
| 4.19.2.   | Asisten Wasit  | OH   | Rp. 150.000    |
| 4.19.3.   | Penanggungjawab Paskibraka                                 | OK   | Rp. 6.000.000  |
| 4.19.4.   | Koordinator Umum Paskibraka                                | OK   | Rp. 5.000.000  |
| 4.19.5.   | Pemateri Paskibraka  | OK   | Rp. 3.000.000  |
| 4.19.6.   | Pelatih Paskibraka   | OK   | Rp. 4.500.000  |
| 4.19.7.   | Asisten Pelatih Paskibraka                                 | OK   | Rp. 3.500.000  |
| 4.19.8.   | Panitia Lokal Paskibraka                                   | OK   | Rp. 3.000.000  |
| 4.19.9.   | Komandan Paskibraka  | OK   | Rp. 4.500.000  |
| 4.19.10.  | Peserta Paskibraka   | OK   | Rp. 1.500.000  |
| 4.19.11.  | Komandan Upacara   | OK   | Rp. 4.500.000  |
| 4.19.12.  | Perwira Upacara  | OK   | Rp. 4.500.000  |
| 4.19.13.  | Pengapit Upacara   | OK   | Rp. 3.500.000  |
| 4.19.14.  | Korp. Musik Pengiring Upacara                              | OK   | Rp. 750.000    |
| 4.19.15.  | Petugas Medik Upacara                                      | OK   | Rp. 2.500.000  |
| 4.19.16.  | Pengamanan Upacara   | KEG. | Rp. 25.000.000 |
| 4.19.17.  | Pelatih Senam  | OB   | Rp. 2.500.000  |
| 4.19.18.  | Asisten Pelatih Senam                                      | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.19.19.  | Operator <i>Sound System</i>                               | OB   | Rp. 1.500.000  |
| 4.19.20.  | Petugas Kebersihan Lapangan/Stadion                        | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.19.21.  | Petugas Kebersihan Taman Stadion                           | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.19.22.  | Petugas Kebersihan Sarana Olahraga <i>Out Door</i>         | OB   | Rp. 2.000.000  |
|   |  |      |                |
| 4.20. Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Taruna Siaga Bencana (Tagana) :  |  |      |                |
| 4.20.1.   | Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)                       | OB   | Rp. 200.000    |
| 4.20.2.   | Program Keluarga Harapan (PKH)                             | OB   | Rp. 200.000    |
| 4.20.3.   | Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)                 | OB   | Rp. 200.000    |
| 4.20.4.   | Taruna Siaga Bencana (Tagana)                              | OB   | Rp. 200.000    |
|   |  |      |                |
| 4.21. Honorarium Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Fasilitator Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Anak (PKDRT), Tenaga Pembibitan/Pemeliharaan Tanaman, Petugas Pengelola Padang Penggembalaan, Honorarium Petugas Penanganan Masalah dan Klaim Asuransi Usaha Ternak, Honorarium Pendamping Kelompok Peternakan Rakyat (KPR)/ Sentra Peternakan Rakyat (SPR) : |  |      |                |
| 4.21.1.   | Operator SIAK Pemerintah Daerah                            | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.21.2.   | Fasilitator PKDRT  | OB   | Rp. 500.000    |
| 4.21.3.   | Tenaga Pembibitan/Pemeliharaan Tanaman                     | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.21.4.   | Petugas Pengelola Padang Penggembalaan                     | OB   | Rp. 2.000.000  |
| 4.21.5.   | Petugas Penanganan Masalah dan Klaim Asuransi Usaha Ternak | OB   | Rp. 500.000    |
| 4.21.6.   | Honorarium Pendamping KPR/SPR                              | OB   | Rp. 1.000.000  |

|   |   |    |                |
|---|---|----|----------------|
| 4.22. Honorarium Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kabupaten Konawe Selatan :          |   |    |                |
| 4.22.1.   | Pengawas Pusdalops-PB (Setingkat Eselon II B)                           | OB | Rp. 1.200.000  |
| 4.22.2.   | Manager Pusdalops (Setingkat Eselon III)                                | OB | Rp. 900.000    |
| 4.22.3.   | Supervisor Pusdalops (Setingkat Eselon IV)                              | OB | Rp. 700.000    |
| 4.22.4.   | Operator Radio Komunikasi (Setingkat Staf)                              | OB | Rp. 500.000    |
| 4.23. Honorarium Pusat Komunikasi Informasi dan Persandian Daerah Kabupaten Konawe Selatan :                          |   |    |                |
| 4.23.1.   | Penanggungjawab Pengelola dan Sistem Jaringan                           | OB | Rp. 5.000.000  |
| 4.23.2.   | Pengelola dan Sistem Jaringan   | OB | Rp. 2.500.000  |
| 4.23.3.   | Penanggungjawab Pengembangan dan Pengelola Aplikasi (Programer)         | OB | Rp. 12.500.000 |
| 4.23.4.   | Teknisi Pengembangan dan Pengelola Aplikasi (Programer)                 | OB | Rp. 5.000.000  |
| 4.23.5.   | Pengelola Teknologi Informasi   | OB | Rp. 2.500.000  |
| 4.23.6.   | Teknisi Produk Multimedia dan Web                                       | OB | Rp. 2.500.000  |
| 4.23.7.   | Administrator Pengelola Jaringan, Pengembangan Aplikasi, dan Persandian | OB | Rp. 10.000.000 |
| 4.23.8.   | Koordinator Pengembangan dan pengelola Aplikasi                         | OB | Rp. 7.500.000  |
| 4.23.9.   | Koordinator Pengelola dan Sistem Jaringan                               | OB | Rp. 7.500.000  |
| 4.24. Honorarium Tim Pengarah dan Tim Evaluator Internal Sistem Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : |   |    |                |
| 4.24.1.   | Penanggung Jawab  | OB | Rp. 5.000.000  |
| 4.24.2.   | Pengarah  | OB | Rp. 4.500.000  |
| 4.24.3.   | Ketua (Supervisor)  | OB | Rp. 4.000.000  |
| 4.24.4.   | Wakil Ketua   | OB | Rp. 3.750.000  |
| 4.24.5.   | Sekretaris  | OB | Rp. 3.000.000  |
| 4.24.6.   | Koordinator   | OB | Rp. 3.250.000  |
| 4.24.7.   | Analisis Sistem SPBE  | OB | Rp. 3.000.000  |
| 4.24.8.   | Anggota   | OB | Rp. 2.750.000  |
| 4.24.9.   | Tenaga Teknologi Informasi  | OB | Rp. 2.500.000  |
| 4.24.10.  | Tenaga Pendukung  | OB | Rp. 2.250.000  |
| 4.25. Honorarium Operasional Keluarga Berencana yang bersumber dari dana DAK antara lain :                            |   |    |                |
| 4.25.1.   | Pengelola Ketua Kelompok (Pokja) Kampung KB                             | OB | Rp. 500.000    |
| 4.25.2.   | Penjaga Malam Balai Penyuluhan Kecamatan                                | OB | Rp. 700.000    |
| 4.25.3.   | Pengelola Keuangan Balai Penyuluhan Kecamatan                           | OB | Rp. 500.000    |
| 4.25.4.   | Tim Verifikasi SPJ BOKB DAK Non Fisik                                   | OB | Rp. 800.000    |

4.26. Honorarium Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana DAK antara lain :

|         |                                     |        |     |           |
|---------|-------------------------------------|--------|-----|-----------|
| 4.25.1. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan   | OB     | Rp. | 2.000.000 |
| 4.25.2. | Tim Verifikator                     | OB     | Rp. | 1.200.000 |
| 4.25.3. | Penanggung Jawab Kegiatan Puskesmas | BOK OB | Rp. | 1.500.000 |
| 4.25.4. | Pengelola Keuangan BOK Puskesmas    | OB     | Rp. | 1.000.000 |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| INSTANSI         | PARAF   |
| 1. SEKDA         |  |
| 2. ASISTEN III   |  |
| 3. KEPALA BKAD   |  |
| 4. KABAG HUKUM   |  |
| 5.               |   |
| 6.               |   |

**Plt. BUPATI KONAWE SELATAN,**

  
**H. ARSALIM ARIFIN**  
